



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
Jl. Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang  
Telp. (0711) 355386-358433 Fax. (0711) 378384  
e-mail: [kanwilsumsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.6-PR.03-0365 31 Desember 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum R.I.  
Cq. Kepala Biro Perencanaan  
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia;
3. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN



[www.sumsel.kemenkumham.go.id](http://www.sumsel.kemenkumham.go.id)



Kanwil Kemenkumham Sumsel



@kumhamsumsel



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SEMAKIN  
PASTI**

**REFORMASI  
HUKUM**

**# bangga  
melayani  
bangsa**

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2024. Suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan sebagai upaya mewujudkan misi organisasi. Guna mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, Instansi Pemerintah merangkum capaian kinerja yang telah ditargetkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal tersebut sebagai perwujudan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja dan keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menyusun laporan kinerja yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai laporan pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja, target kinerja serta capaian kinerja selama Tahun 2024 dalam melakukan misi dan tujuan organisasi baik yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024. Sebagai suatu harapan bersama bahwa dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat melakukan optimalisasi peran Kantor Wilayah Sumatera Selatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan pada tahun selanjutnya sehingga mendukung kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mewujudkan Good Governance, Clean Governance, serta tetap dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Adapun bentuk penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor Wilayah,



Illham Djaya

NIP 196412201991031002

## *IKHTISAR EKSEKUTIF*

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Birokrasi pemerintahan juga memiliki fungsi terkait penyelenggaraan pelayanan publik di masyarakat dan aparatur negara. Melalui birokrasi, diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan publik.

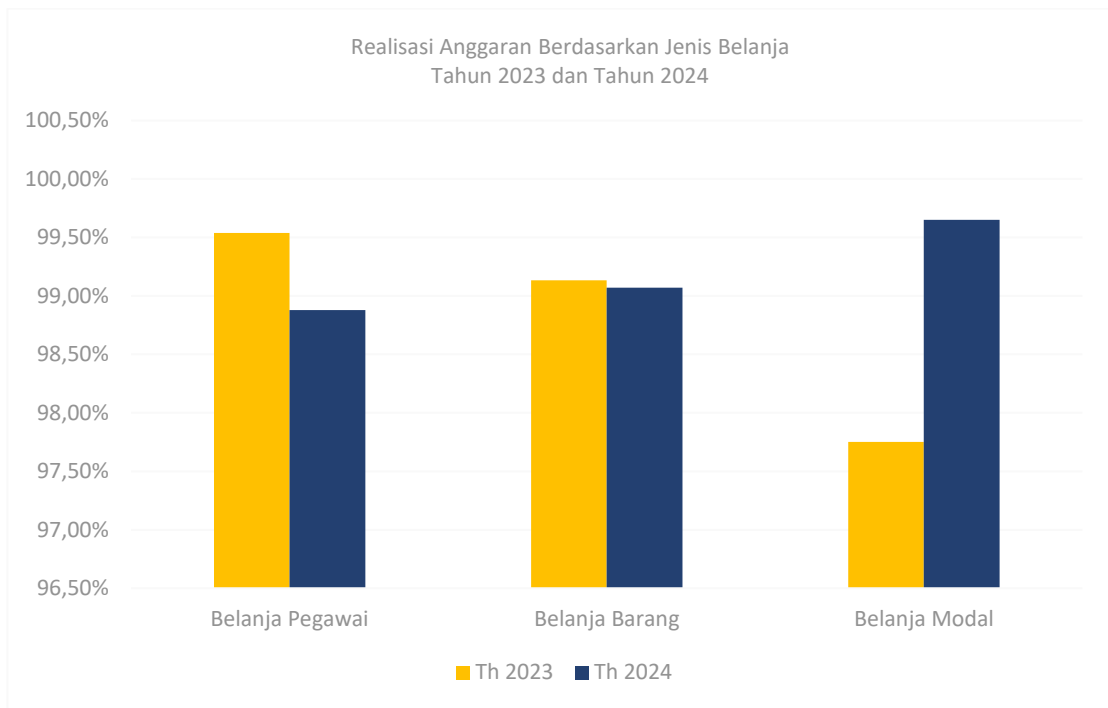
Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM, terdapat beberapa Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan diharapkan dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui pelaksanaan Perjanjian Kinerja dengan rincian sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	101
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>		
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	111,40
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	84
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>		
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>		
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-569,50
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111,11
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	-
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	120,10
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>		
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	400
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	120,22
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>		
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	145,98
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	111,11
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	125

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2024 adalah 95% untuk jenis belanja pegawai,

90% untuk jenis belanja barang dan 90% untuk jenis belanja modal. Adapun jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi target penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja.



Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 50 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 50 persen sehingga diperoleh rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebesar 80,89.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	5
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	13
D. ASPEK STRATEGIS .....	13
E. ISU STRATEGIS.....	14
F. SISTEMATIKA LAPORAN .....	15

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS .....	17
B. PERJANJIAN KINERJA .....	23

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	26
B. REALISASI ANGGARAN .....	113
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .....	116
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....	119

### BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .....	123
B. SARAN .....	124

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	3
2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 ..	20
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	24
4. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	26
5. Capaian Kinerja Divisi Administrasi/Sekretariat Jenderal Tahun 2024.....	27
6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	27
7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	28
8. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan .....	29
9. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan .....	29
10. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	30
11. Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan/Direktorat Jenderal Pemasarakatan.....	31
12. Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Penegakkan Hukum Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2024 .....	32
13. Dimensi pada Indeks Penegakkan Hukum Pemasarakatan di Wilayah .....	32
14. Dimensi pada Indeks Pelayanan Tahanan .....	32
15. Perhitungan Indeks Pelayanan Tahanan .....	33
16. Dimensi pada Indeks Pengelolaan Basan Baran di Wilayah .....	34
17. Perhitungan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah .....	35
18. Dimensi pada Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah .....	36
19. Perhitungan Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah .....	37
20. Dimensi pada Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Wilayah.....	39
21. Perhitungan Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Wilayah .....	39
22. Perhitungan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan di Wilayah .....	40
23. Dimensi pada Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah .....	41
24. Perhitungan Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah .....	42
25. Dimensi pada Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah .....	44
26. Perhitungan Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah .....	45
27. Dimensi pada Indeks Kemanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di Wilayah ....	51

28. Perhitungan Indeks Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di Wilayah .....	51
29. Perhitungan Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah .....	54
30. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	55
31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Tahun 2024 .....	57
32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	58
33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 .....	59
34. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024.....	59
35. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	60
36. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi.....	60
37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani Tahun 2024 .....	61
38. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	62
39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani Tahun 2024.....	62
40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	63
41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024 .....	64
42. Rekapitulasi Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan dan Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024 .....	65
43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	65
44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Tahun 2024.....	68
45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	68
46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 .....	69
47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	69

48. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	70
49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Presentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 .....	71
50. Perhitungan Presentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah.....	71
51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	71
52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	72
53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 .....	73
54. Perhitungan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan.....	73
55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	74
56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	74
57. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	75
58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024.....	76
59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	76
60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	77
61. Data PPNS Kekayaan Intelektual.....	77
62. Data Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual .....	78
63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024.....	79
64. Data Kegiatan Promosi, Diseminasi, Edukasi Tahun 2024.....	79
65. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	80
66. Data Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual .....	81
67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 .....	81
68. Data Permohonan Kekayaan Intelektual .....	81

69. Data Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal.....	82
70. Data Indikasi Geografis .....	82
71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	83
72. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	83
73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 ....	84
74. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 .....	85
75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya..	85
76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah....	85
77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024.....	87
78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	87
79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	87
80. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	88
81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2024 .....	89
82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	89
83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2024 .....	90
84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	91
85. Perbandingan Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDH yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDH di Wilayah Tahun 2024.....	92
86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDH yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDH di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	93
87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 .....	94
88. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	94

89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	95
90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024.....	95
91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	96
92. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	96
93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2024 .....	98
94. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/KelurahanSadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	99
95. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	100
96. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan Tahun 2024 .....	101
97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	102
98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan Tahun 2024 .....	102
99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Terhadap Total K/L/D di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	103
100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah Tahun 2024 .....	104
101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	105
102. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM diKewilayahan Tahun 2024 .....	106
103. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM diKewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	107

104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024 .....	108
105. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024 .....	108
106. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	108
107. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan Tahun 2024 .....	110
108. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	110
109. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	111
110. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024 .....	112
111. Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti .....	112
112. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	113
113. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah .....	113
114. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan.....	114
115. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja .....	115
116. Rekapitulasi SMART, IKPA dan Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 .....	117
117. Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	123

## Daftar Gambar

1. Jumlah Pegawai di Jaringan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Pangkat Golongan.....	3
2. Jumlah Pegawai di Jaringan Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan.....	4
3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	12
4. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	27
5. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	31
6. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	57
7. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	61
8. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	64
9. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	67
10. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	71
11. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	73
12. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	76
13. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	79
14. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	84
15. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	86
16. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	89
17. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	92
18. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	93
19. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	97
20. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	101
21. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	109
22. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan .....	112
23. E-Monev Bappenas .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, dalam konteks perwujudan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan HAM, peran dan andil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menjadi sangat penting terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi di wilayah. Dalam kondisi demikian, kinerja birokrasi pemerintah yang unggul menjadi suatu keharusan serta selalu menjadi perhatian publik.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan; pembinaan dibidang Hukum dan HAM; penegakan hukum di bidang masyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan HAM; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi HAM; pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terletak di Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 berdekatan dengan Pengadilan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berada di 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota yaitu : (1) Ogan Komering Ilir; (2) Ogan Komering Ulu; (3) Muara Enim; (4) Lahat; (5) Musi Rawas; (6) Musi Banyuasin; (7) Banyuasin; (8) OKU Selatan; (9) OKU Timur; (10) Ogan Ilir; (11) Empat Lawang; (12) Palembang; (13) Prabumulih; (14) Pagaralam; (15) Lubuk Linggau; (16) Penukal Abab Lematang Ilir; (17) Musi Rawas Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan terdiri dari 29 Satuan Kerja yang meliputi:

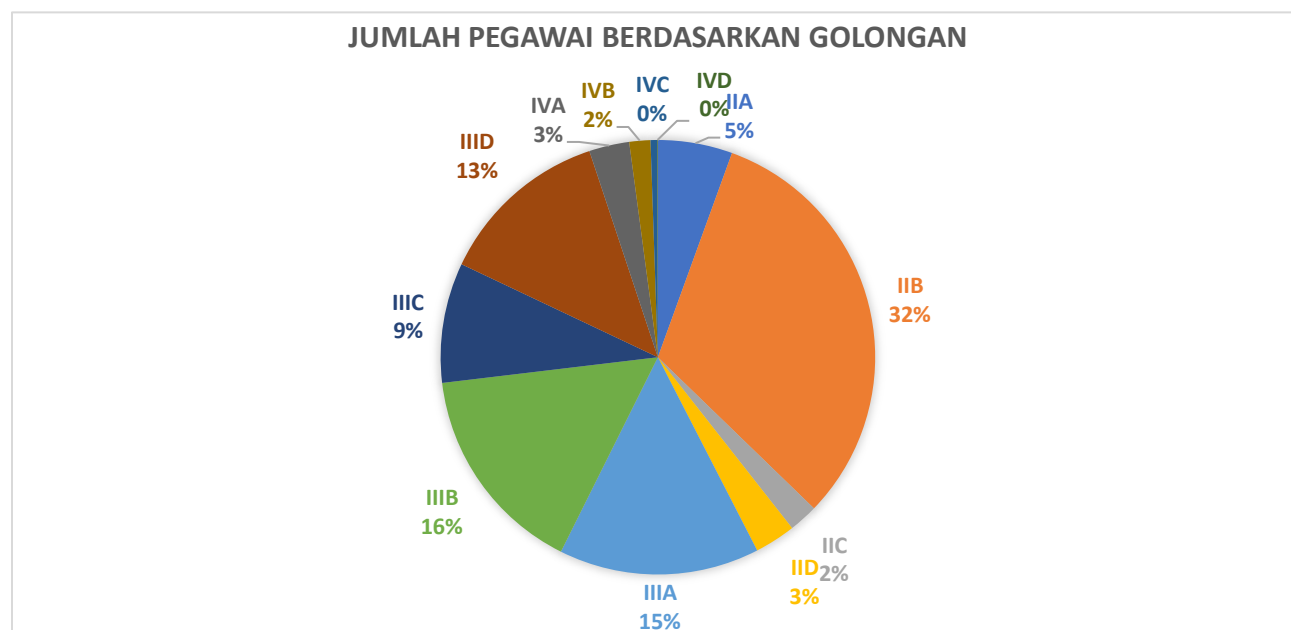
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan sebanyak 26 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Palembang;
  - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
  - c. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat;
  - d. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lubuk Linggau;
  - e. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim;
  - f. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sekayu;
  - g. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjung Raja;
  - h. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Baturaja;
  - i. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih;
  - j. Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang;
  - k. Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang;
  - l. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palembang;
  - m. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Baturaja;
  - n. Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat;
  - o. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang;
  - p. Balai Pemasarakatan Kelas II Musi Rawas Utara;
  - q. Balai Pemasarakatan Kelas II Ogan Komering Ulu Induk;
  - r. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuasin;
  - s. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kayu Agung;
  - t. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Banyuasin;
  - u. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Empat Lawang;
  - v. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Surulangun Rawas;
  - w. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pagar Alam;
  - x. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Martapura;
  - y. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Dua;
  - z. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
3. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi sebanyak 2 Satuan Kerja, yang terdiri dari:
  - a. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
  - b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.

Adapun kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dapat dilihat melalui tabel dan gambar berikut:

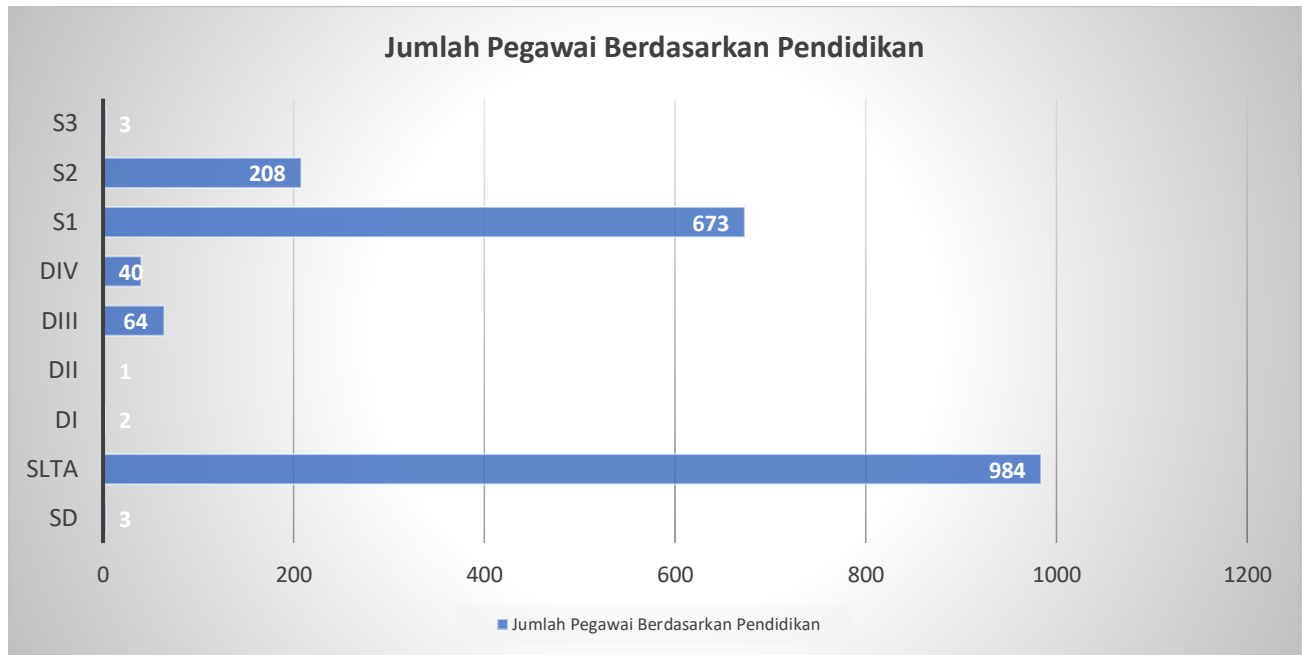
**Tabel 1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO.	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN	121	80	201
2	LAPAS KELAS I PALEMBANG	104	15	119
3	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	69	21	90
4	LAPAS KELAS IIA LAHAT	58	9	67
5	LAPAS KELAS IIA LUBUK LINGGAU	61	11	72
6	LAPAS KELAS IIB MUARA ENIM	77	8	85
7	LAPAS KELAS IIB SEKAYU	65	4	69
8	LAPAS KELAS IIA TANJUNG RAJA	76	11	87
9	RUTAN KELAS IIB BATURAJA	39	7	46
10	RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH	55	14	69
11	RUTAN KELAS I PALEMBANG	109	16	125
12	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG	58	39	97
13	RUPBASAN KELAS I PALEMBANG	17	11	28
14	RUPBASAN KELAS II BATURAJA	8	5	13
15	KANIM KELAS I TPI PALEMBANG	48	35	83
16	KANIM KELAS II NON TPI MUARA ENIM	23	7	30
17	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT	27	7	34
18	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	15	76	91
19	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUSI RAWAS UTARA	14	8	22
20	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II OGAN KOMERING ULU INDUK	15	8	23
21	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	77	8	85
22	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	76	10	86
23	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	77	12	89
24	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	34	7	41
25	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	29	1	30
26	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	45	6	51
27	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	61	9	70
28	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	45	4	49
29	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	76	11	87
<b>TOTAL</b>		<b>1.581</b>	<b>462</b>	<b>2.041</b>

**Gambar 1. Jumlah Pegawai di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Pangkat Golongan**



**Gambar 2. Jumlah Pegawai di Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel Berdasarkan Pendidikan**



Pada awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terdapat kebijakan baru yang membahas mengenai jumlah kelompok kementerian yang bertambah dari semula 34 menjadi 48 kelompok kementerian. Pembagian kementerian ini dibagi ke dalam Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II dan Kementerian Kelompok III. Kementerian yang awalnya merupakan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk ke dalam Kementerian Kelompok II, yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dengan ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut, berdasarkan aturan baru yang telah berlaku yang dimuat pada Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024. Aturan ini mengatur struktur organisasi kementerian yang diperbaharui, sejalan dengan kebutuhan untuk lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian, Kantor Wilayah Sumatera Selatan menghadapi masa transisi perubahan organisasi dan tata laksana. Sehubungan dengan pemisahan Kementerian, akan terdapat 4 Kantor Wilayah, yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, dan Kantor Wilayah Pemasarakatan. Hingga saat laporan ini dibuat, belum terdapat aturan mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada masing-masing Kantor Wilayah tersebut. Dengan demikian, pada level Kantor Wilayah masih menggunakan aturan yang lama yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dibutuhkan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. LKjIP adalah bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan tugas 9 (sembilan) Unit Eselon I di wilayah, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tangan dalam hal penyelenggaraan tugas dan fungsi unit pusat melalui 4 program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Pembentukan Regulasi;
3. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
4. Program Pemajuan dan Penegakan HAM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Hak Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pamasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Konsultasi dan bantuan hukum;
8. Pengordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Divisi yaitu Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Adapun tugas dan fungsi 4 Divisi dimaksud sebagai berikut:

### **1. Divisi Administrasi**

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun fungsi dari Divisi Administrasi adalah:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari 2 bagian, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **1) Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Umum terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

##### **a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

##### **b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

#### **2) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas antara lain penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu:

##### **a) Subbagian Program dan Pelaporan:**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

**b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi:**

Melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

## **2. Divisi Pemasyarakatan**

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Adapun fungsi dari Divisi Pemasyarakatan adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Terdiri dari 2 (dua) sub bidang yaitu:

#### **a) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

#### **b) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

## **2) Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

### **a) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

### **b) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

## **3. Divisi Keimigrasian**

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Jenderal Imigrasi di wilayah. Adapun fungsi Divisi Keimigrasian adalah:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

### **1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian**

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

#### **a) Subbidang Perizinan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan keimigrasian.

#### **b) Subbidang Informasi Keimigrasian:**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta

penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

## **2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

### **a) Subbidang Intelijen Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

### **b) Subbidang Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

## **4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Adapun fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 3 bidang, dengan penjelasan sebagai berikut:

**1) Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

**a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

**b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

**2) Bidang Hukum**

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

**a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

**b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

### **3) Bidang Hak Asasi Manusia**

Bidang HAM mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia Terdiri dari 2 (dua) subbidang yaitu:

#### **a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia**

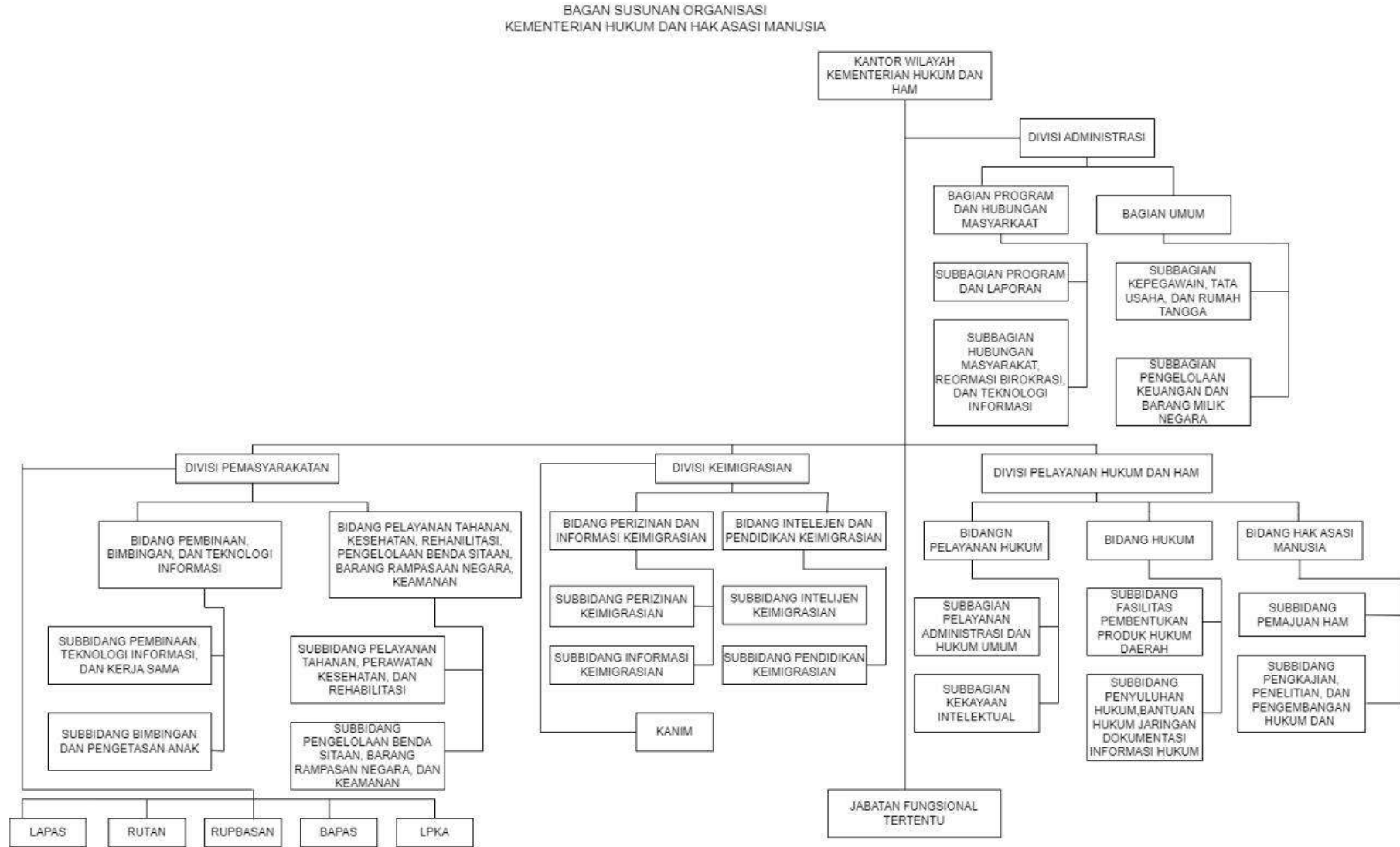
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

#### **b) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan HAM.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



### C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

### D. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 2 (dua) prioritas nasional, yang terdiri dari:

- Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
- Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
2. Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual;

4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia;
5. Pelayanan hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi Hak Asasi Manusia;
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

## E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaannya, mengingat kondisi umum potensi dan permasalahan dan pemetaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan organisasi, terdapat beberapa isu strategis yang terdiri dari kekuatan atau peluang dan juga kelemahan dan tantangan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Adapun hal-hal yang menjadi kekuatan atau peluang yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan memiliki jenis pelayanan publik yang cukup bervariasi, mempunyai peran koordinasi dan fasilitasi dalam aspek perencanaan dan pembentukan hukum, penyelenggaraan pelayanan hukum, penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, meningkatnya kontrol publik terhadap proses dan hasil kinerja kementerian, serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

Adanya restrukturisasi organisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada kabinet merah putih Presiden Prabowo menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan, yang menjadi permasalahan pada setiap divisi di antaranya adalah sebagai berikut:

- Divisi Administrasi
  - Terbatasnya ketersediaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada e-katalog sehingga upaya dalam rangka mendukung terlaksananya Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tidak maksimal
- Divisi Pemasyarakatan
  - Masih terdapat *overstaying* (kelebihan masa huni tahanan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan
  - Masih terdapat *over capacity* (kelebihan kapasitas Warga Binaan) pada Lapas/Rutan yang berada di Sumatera Selatan
- Divisi Keimigrasian
  - Sering terjadinya error pada Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPO) dan M- Paspor;
  - Keterbatasan kuota permohonan Paspor secara online melalui Aplikasi M-Paspor yang dibuka dalam kurun waktu per 2 minggu;
  - Pendirian Unit Kerja Kantor Imigrasi Musi Banyuasin di Kabupaten Sekayu dan Kota Lubuk Linggau telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, tetapi belum bisa beroperasi secara maksimal dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan pelayanan Keimigrasian;

- Belum sepenuhnya pelaporan keberadaan orang asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) oleh pihak Hotel dan penginapan yang berada di wilayah Sumatera Selatan;
- Tidak pastinya jadwal persetujuan Maksimum Pencairan (MP) atas anggaran PNP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai kalender kerja.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
  - Banyak Pemerintah Daerah yang masih kurang peka tentang tugas dan fungsi dari Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah;
  - Masih terdapat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memahami perlunya keikutsertaan perancang dalam pembentukan produk hukum daerah;
  - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah pada tahun 2024 menyebabkan tidak daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan PNBPN fidusia menurun.

## **F. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi untuk mencapai sasaran strategis yang telah disusun.

Adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu:

*Visi* :

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

*Misi* :

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan public di bidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung penegakan hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakat;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, termasuk pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah PASTI yang merupakan akronim dari Profesional,

Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa memegang teguh *Core Values* ASN BerAKHLAK. *Core values* **BerAKHLAK** yang dimaksud merupakan singkatan dari **Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif**. Setiap core value tersebut memiliki nilai-nilai dasar dengan makna:

#### 1. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.

#### 2. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

### 3. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

### 4. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

### 5. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

### 6. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

### 7. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya ialah:

- a. Meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
- g. Meningkatkan kesadaran hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur;
- h. Meningkatkan SDM kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia yang unggul dan berdaya saing;
- i. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan;
- j. Meningkatkan efektivitas organisasi;

- k. Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan Hak Asasi Manusia;
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>					
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	Program Dukungan Manajemen	25.713.209.000
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks		
TOTAL					25.713.209.000
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>					
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	135.604.971.000
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	Program Dukungan Manajemen	153.372.678.000
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks		
TOTAL					288.977.649.000
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>					
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani	90%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	2.477.449.000
		Persentase tindakan administratif keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%		
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di wilayah yang diterima	90%	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	4.782.895.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Imigrasi	100%	Program Dukungan Manajemen	23.430.316.000
		Indeks Kepuasan Unit Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks		
TOTAL					30.690.660.000
<b>Direktorat Jenderal AHU – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.888.636.000
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.051.099.000
TOTAL					2.939.735.000
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	92.560.000
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.783.010.000
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
TOTAL					1.875.570.000
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Program Pembentukan Regulasi	286.051.000
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang	Program Pembentukan Regulasi	168.949.000
TOTAL					455.000.000
<b>BPHN – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	Program Pembentukan Regulasi	128.253.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
	Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen		
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	77.132.000
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.372.920.000
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	99.750.000
<b>TOTAL</b>					<b>1.678.005.000</b>
<b>Direktorat Jenderal HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>					
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	57.028.000
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%		
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks		
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi	90%	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	172.706.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran (Rp)
		Produk Hukum Daerah yang Disampaikan			
TOTAL					229.734.000
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Program Dukungan Manajemen	285.196.000
TOTAL					285.196.000
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>					

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah disusun guna membantu mewujudkan sasaran-sasaran secara tepat, terukur, dan dan akuntabel. Perjanjian tersebut berisi indikator kinerja utama yang dapat menjadi alat bantu ukur.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan 9 urusan sebagai turunan dari Unit Eselon I yakni sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
4. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
8. Direktorat Jenderal Keimigrasian;
9. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

## B. Perjanjian Kinerja

Secara definisi, perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang memiliki 4 (empat) divisi, pada tahun 2023 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah. Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pemasarakatan, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai.

Adapun rincian perencanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang perlu dicapai yang berdasarkan perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>			
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks
<b>Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Divisi Pemasarakatan</b>			
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>			
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		Persentase tindakan administratif keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di lingkup UPT Imigrasi	100%
		Indeks Kepuasan Unit Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks
<b>Direktorat Jenderal AHU – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Presentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundangundangan	21 orang
<b>BPHN – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
<b>Direktorat Jenderal HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</b>			
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2024. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2024 telah tercapai sebagaimana berikut

**Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	101
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>		
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	111,40
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	84
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>		
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>		
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-569,50
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111,11
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	-
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	120,10
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>		
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	400
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	120,22
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>		
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	145,98
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	111,11
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	125

## Analisa Capaian Kinerja

- **Capaian Kinerja Divisi Administrasi/Sekretariat Jenderal**

Sasaran Kegiatan	
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 100% dan Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target 3,1 indeks.

**Tabel 5. Capaian Kinerja Divisi Administrasi/Sekretariat Jenderal Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	<b>100</b>
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1 indeks	3,14 indeks	<b>101,29</b>

**Gambar 4. Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



### Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	100%	100

Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dihitung dengan formulasi sebagai berikut.

$$X = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{55}{55} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Dengan demikian, dapat diperoleh bahwa persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah 100% dan telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, tidak terdapat indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%	100%	100%	100

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.
- Penyebab keberhasilan  
Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa hal sebagaimana berikut:
  - Komitmen pimpinan akan pentingnya reformasi birokrasi

- Implementasi reformasi birokrasi dalam tuis sehari-hari oleh seluruh jajaran sudah menjadi rutinitas
- Adanya evaluasi berkala secara berjenjang oleh pihak internal maupun eksternal

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RKT RB oleh Biro Perencanaan setiap Triwulan
- *Sharing knowledge* yang komunikatif antara tim pelaksana dan tim verifikator
- Monev dan peninjauan langsung oleh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah dan Unit Utama

**Indikator Kinerja Kegiatan 2: “Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan”**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1 indeks	3,14 indeks	101,29

Nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terhadap layanan kesekretariatan didapat dari rata-rata hasil survei Indeks Layanan Kesekretariatan Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 9. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan**

No.	Bulan	Jumlah Responden	Nilai
1	September	8	2,54
2	Oktober	31	3,74
		<b>39</b>	<b>3,14</b>

Berdasarkan hasil survei Indeks Layanan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Bulan September dan Oktober, diperoleh hasil sebagaimana pada tabel di atas. Hasil tersebut sesuai dengan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, tidak terdapat indikator Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1 indeks	3,1 indeks	3,14 indeks	101,29

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi kedua target tersebut, yaitu 101,29%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja kegiatan ini tidak memiliki standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh adanya beberapa peningkatan dalam hal layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagaimana berikut:

- 1) Terkait budaya organisasi dan sistem anti korupsi, sebagai langkah awal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melaksanakan Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly secara virtual. Sebagai tindak lanjutnya, Kantor Wilayah telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP), Satgas Saber Pungli serta Unit Pemilik Risiko yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Susunan tim yang telah dibentuk rutin melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan antikorupsi, mulai dari Sosialisasi SPIP, Manajemen Risiko dan Pembangunan Budaya Antikorupsi, Penyuluhan Gerakan Antikorupsi dan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga melakukan Penguatan dan Pendampingan WBK/WBBM serta Manajemen Risiko ke Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.
- 2) Kepala Kantor Wilayah selaku pimpinan tertinggi juga tak henti-hentinya memberikan penguatan dan internalisasi kepada seluruh pegawai agar melakukan pelayanan berdasarkan integritas.
- 3) Terkait integritas dalam pelaksanaan anggaran, salah satunya telah didukung dengan adanya digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Dengan adanya e-katalog, pelayanan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat serta aman dari penyalahgunaan. Di samping itu, e-katalog dapat mendukung pelaku usaha lokal yang menengah atas dan bawah untuk menawarkan produk mereka, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan nilai hasil survey, pimpinan senantiasa melakukan penguatan dan internalisasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada publik. Selain itu, untuk mengoptimalkan jumlah responden survey, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan para pegawai untuk mengisi survey di setiap akhir bulan. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai maupun media *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.

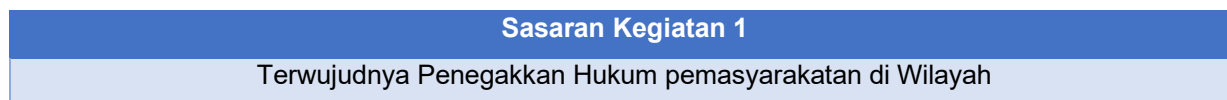
- Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan/Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Capaian Kinerja pada Divisi Pemasarakatan terbagi menjadi 2 Sasaran Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

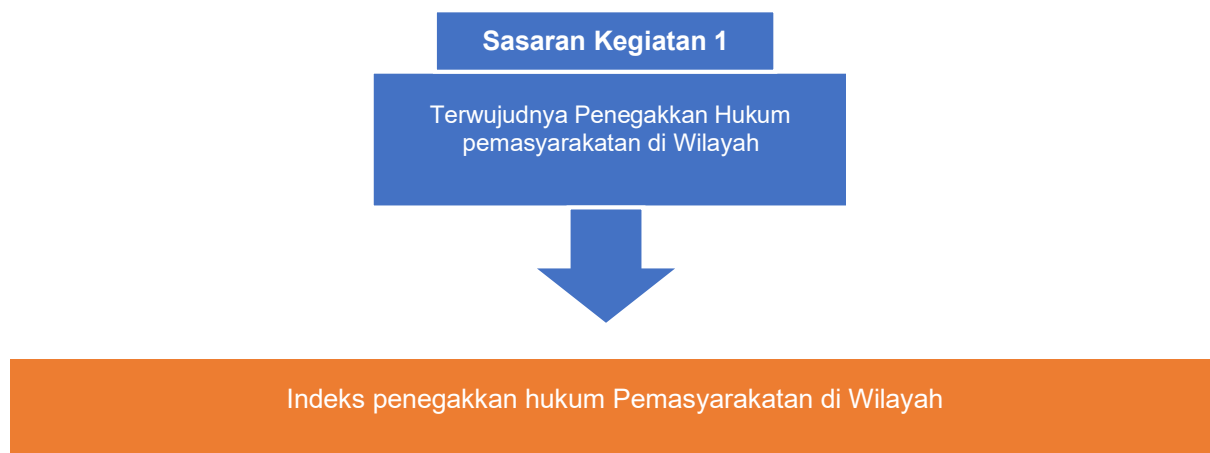
**Tabel 11. Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan/Direktorat Jenderal Pemasarakatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum pemsarakatan di Wilayah	Indeks penegakkan hukum Pemsarakatan di Wilayah	3,6 indeks	4 indeks	<b>111,1</b>
2	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemsarakatan	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemsarakatan	100%	100%	<b>100</b>
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemsarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1 indeks	2,09 indeks	<b>67,4</b>

Adapun rincian capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut.



**Gambar 5. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan 1: “Indeks Penegakkan Hukum Pemsarakatan di Wilayah”**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Target Indeks Penegakkan Hukum Pemasarakatan di Wilayah Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum pemasarakatan di Wilayah	Indeks penegakkan hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 indeks	4 indeks	111,1

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi penyelenggaraan kegiatan di bidang:

- a. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
- b. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- d. Pengamanan dan Intelijen;
- e. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- f. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan.

Indikator ini diukur melalui 8 dimensi ukuran sebagai berikut:

**Tabel 13. Dimensi pada Indeks Penegakkan Hukum Pemasarakatan di Wilayah**

No.	Dimensi Penilaian	Bobot
1.	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%
2.	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%
3.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%
4.	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%
5.	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%
6.	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%
7.	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%
8.	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%
<b>Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah</b>		<b>100%</b>

Perhitungan indikator kinerja kegiatan indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah Sumatera Selatan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indeks pelayanan tahanan di wilayah

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelayanan tahanan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Indeks pelayanan tahanan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 14. Dimensi pada Indeks Pelayanan Tahanan**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1.	Administrasi Tahanan	Registrasi Tahanan	% Penanganan overstaying tahanan	50%
2.	Pelayanan Tahanan	Layanan Kepribadian (Fasilitasi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum)	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum	50%
			% Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan Bantuan Hukum	
		Pelayanan Jasmani	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	
		Pelayanan Rohani	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	

Untuk rincian perhitungan indeks pelayanan tahanan di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perhitungan Indeks Pelayanan Tahanan

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	% Penanganan overstaying tahanan	Jumlah tahanan yang tidak overstaying	Total jumlah tahanan	26943	28699	93.88	28669	28669	<b>3.88</b>	3.6	107.8
2.	% Tahanan yang mendapatkan penyuluhan hukum	Total Penerima bankum	Total pemohon bantuan hukum	700	611	114.57	0.50	50.15			
	% Pemohon Bantuan Hukum yang mendapatkan Bantuan Hukum										
3.	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Jasmani	Total Jumlah Tahanan	24750	28669	86.33					
4.	% Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	Jumlah Tahanan yang mendapatkan Pelayanan Rohani	Total Jumlah Tahanan	28669	28669	100.00					

Data-data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari sumber-sumber data berikut ini:

- 1) Data jumlah tahanan dan jumlah tahanan yang tidak *overstaying* diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan *overstaying* seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan;
- 2) Data jumlah pemohon bantuan hukum dan penerima bantuan hukum diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan bantuan hukum seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan;
- 3) Data jumlah tahanan yang mendapatkan pelayanan jasmani diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi pada form data tahanan yang melakukan aktivitas fisik cukup di seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan;
- 4) Data jumlah tahanan yang mendapatkan pelayanan rohani menyesuaikan dengan data total jumlah tahanan pada tahun berjalan karena setiap tahanan di seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan mendapatkan fasilitas beribadah.

Berdasarkan perhitungan di atas, indeks pelayanan tahanan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,78. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,88}{3,6} \times 100\% = 107,8\%$$

Capaian atas indikator indeks pelayanan tahanan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 107,8%.

b. Indeks pengelolaan basan baran di wilayah

Pengelolaan data dari rangkaian Pengelolaan Basan Baran di hitung dengan formulasi yang telah dilakukan dan menjadi nilai Indeks Pengelolaan Basan Baran.

Indeks pengelolaan basan baran terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 16. Dimensi pada Indeks Pengelolaan Basan Baran di Wilayah**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1.	Administrasi Basan Baran	Registrasi Basan Baran	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	50%
			% Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permen Kumham nomor 16 Tahun 2014)	
2.	Pengelolaan Fisik Basan Baran	Pengamanan	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal)	50%
			% Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	
		Mutasi dan Klarifikasi	% Pengeluaran Basan Baran	

Untuk rincian perhitungan indeks pengelolaan basan baran di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perhitungan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	% Pengadministrasian Basan pada wilayah kerja	Jumlah Basan yang Teradministrasi pada wilayah kerja	Jumlah Basan pada suatu wilayah kerja	43,776	43,776	100	0.50	51.72	3.42	3.6	95
2.	% Rekomendasi berdasarkan hasil Penilaian dan klasifikasi basan (cepat rusak, berbahaya dan biaya penyimpanan terlalu tinggi sesuai amanat pasal 45 KUHAP dan pasal 21 Permen Kumham nomor 16 Tahun 2014)	Jumlah Rekomendasi hasil Penilaian dan klasifikasi basan	Jumlah Basan baran cepat rusak,berbahaya dan biaya pemeliharaan terlalu tinggi	39,262	36,741	107					
3.	% Basan Baran Kehilangan/Rusak (pencurian, perusakan, penukaran, keluarnya Basan dan Baran secara illegal	Jumlah Basan Baran yang hilang/rusak/ ditukar	Jumlah Basan Baran pada suatu wilayah kerja	0	43,776	100	0.50	33.74			
4.	% Penyelamatan Basan Baran dalam kondisi darurat	Jumlah Basan yang diselamatkan pada kondisi luarbiasa	Jumlah Basan Baran yang berada di Rupbasan saat kejadian luar biasa	36,605	36,562	100					

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
5.	% Pengeluaran Basan Baran	Jumlah Basan Baran yang dikeluarkan	Jumlah Basan Baran yang telah berkekuatan hukum tetap	46	1,982	2					

Seluruh data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan Basan Baran yang dikirimkan oleh Rupbasan Kelas I Palembang dan Rupbasan Kelas II Baturaja ke Kantor Wilayah melalui Divisi Pemasarakatan. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks pengelolaan basan baran di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,42. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,42}{3,6} \times 100\% = 95\%$$

Capaian atas indikator indeks pengelolaan basan baran di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 95%.

c. Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah

Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana adalah indikator untuk mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan yang diberikan kepada Anak Binaan di LPKA. Keberhasilan Pembinaan bagi Narapidana terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

**Tabel 18. Dimensi pada Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1.	Pembinaan bagi narapidana	Kepribadian	% narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	50%
			% narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	
		Kemandirian	% narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	
			% narapidana yang bekerja	
2.	Pembinaan bagi Anak Binaan	Pengasuhan/ Pengentasan	% Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal	50%
			% Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan	

Untuk rincian perhitungan indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Perhitungan Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Wilayah

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	% narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik	Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian	104306	116896	89.23	0.50	54.63	<b>2.95</b>	3.60	81,9
2.	% narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin	Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian	89743	99181	90.48					
3.	% narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi	Total narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi	1466	1466	100					
4.	% narapidana yang bekerja	Jumlah narapidana yang bekerja	Total narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi	2783	1769	157.32					

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
5.	% Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non-formal	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan	Anak Binaan di LPKA	822	1514	54.29	0.50	19.22			
6.	% Anak Binaan yang memperoleh pelatihan keterampilan	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan	Jumlah Anak Binaan di LPKA	342	1514	22.59					

Data-data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari sumber-sumber data berikut ini:

- 1) Data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian, narapidana yang memperoleh predikat baik, dan narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan;
- 2) Data jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi, narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi, serta narapidana yang bekerja diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan kegiatan kerja seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan;
- 3) Data jumlah anak binaan, jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan, dan jumlah anak binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan diperoleh dari laporan bulanan LPKA Kelas I Palembang.

Berdasarkan perhitungan di atas, indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 2,95. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Capaian =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{2,95}{3,6} \times 100\% = 81,9\%$

Target 3,6

Capaian atas indikator indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 81,9%.

d. Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah

Indeks Pemenuhan Hak Narapidana/Anak Binaan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur pemenuhan hak Narapidana yang berada di Lapas/Rutan dan pemenuhan hak kepada Anak Binaan yang berada di LPKA. Keberhasilan pemenuhan hak bagi Narapidana/Anak Binaan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

**Tabel 20. Dimensi pada Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Wilayah**

No.	Dimensi	Indikator	Bobot
1.	Pemenuhan Hak Remisi	% narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan Hak Remisi	50%
2.	Pemenuhan Hak Integrasi	% narapidana/Anak Binaan yang mendapatkan layanan program integrasi (PB, CB dan CMB)	50%

Untuk rincian perhitungan indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 21. Perhitungan Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Wilayah**

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	% Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat	23113	23113	100	50%	50.00	<b>3.99</b>	3.6	111.1
2.	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah narapidana dan Anak Binaan yang diusulkan memperoleh hak integrasi (PB, CB, dan CMB) dan	21996	21998	99.99	50%	50.00			

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
			memenuhi syarat								

Seluruh data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari rekapitulasi usulan remisi dan integrasi seluruh Lapas/Rutan/LPKA wilayah Sumatera Selatan selama periode Januari-Desember 2024. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,99. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,99}{3,6} \times 100\% = 111,08\%$$

$$\frac{\text{Target}}{\text{Target}} = \frac{3,6}{3,6}$$

Capaian atas indikator indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 111.08%

e. Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah

Indikator ini merepresentasikan tingkat keberhasilan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam menyiapkan diri untuk dapat melanjutkan hidup setelah bebas.

Klien pemasyarakatan dinyatakan sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas jika memenuhi tiga kriteria berikut ini:

- a) Sudah memiliki rencana/kontrak program pembimbingan
- b) Sudah mengikuti pendampingan/pembimbingan
- c) Tidak pernah melakukan pelanggaran.

Untuk rincian perhitungan indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 22. Perhitungan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di Wilayah**

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan	Jumlah klien pemasyarakatan yang sudah siap melanjutkan hidup pasca bebas	Total Klien Pemasyarakatan	8225	5003	<b>6.58</b>	3.6	182.8

Seluruh data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari rekapitulasi laporan klien pemasyarakatan seluruh Bapas di wilayah Sumatera Selatan selama periode Januari-Desember 2024. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 6,58. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{6,58}{3,6} \times 100\% = 182,8\%$$

Capaian atas indikator indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 182,8%.

f. Indeks pembinaan khusus anak di wilayah

Indeks pembinaan khusus anak adalah indikator untuk mengukur kinerja pembinaan yang diberikan kepada kepada Anak Binaan di LPKA. Keberhasilan Pembinaan bagi Anak Binaan terbagi ke dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

**Tabel 23. Dimensi pada Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah**

No.	Dimensi	Variabel	Indikator	Bobot
1.	Pembinaan Kepribadian	Pembinaan Kepribadian	% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	15%
		Kemampuan Intelektual pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.	% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal	15%
2.	Pembinaan Kemandirian	Pendidikan Informal	% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	35%
3.	Pemenuhan Hak Bersyarat	Remisi	% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	15%
		Asimilasi	% Pencabutan Hak Asimilasi	10%
		Integrasi	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	10%

Untuk rincian perhitungan indeks pembinaan khusus anak di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 24. Perhitungan Indeks Pembinaan Khusus Anak di Wilayah

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	% Anak yang mengalami perubahan, perilaku kearah yang lebih baik	Jumlah Anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin)	Jumlah Anak Binaan	2220	2238	99.2	0.15	14.88	23.02	<b>3.42</b>	3.6	95
2.	% Anak yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal,	Jumlah Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan formal dan non formal	Jumlah Anak Binaan	822	1514	54.29	0.15	8.14				
3.	% Anak yang mengikuti pendidikan informal (keterampilan)	Jumlah Anak binaan yang terampil	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti pendidikan informal	332	365	90.96	0.35	31.84	31.84			
4.	% Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan Hak Remisi	Jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (negative list)	Jumlah Anak	169	238	71.01	0.15	10.65	30.65			
5.	%Pencabutan Hak Asimilasi	Jumlah Pencabutan Asimilasi	Jumlah Asimilasi	0	0	100	0.10	10				

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
6.	% Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Integrasi (PB, CB, CMB)	Jumlah Anak yang memenuhi syarat mendapatkan Hak Integrasi	22	22	100	0.10	10				

Data-data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari sumber-sumber data berikut ini:

- 1) Data jumlah anak binaan dan jumlah anak binaan yang mengalami perubahan perilaku (sadar, patuh, dan disiplin) diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) di LPKA Kelas I Palembang;
- 2) Data jumlah anak binaan, jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan (formal, nonformal, informal), dan jumlah anak binaan yang mengikuti pelatihan keterampilan diperoleh dari laporan bulanan LPKA Kelas I Palembang;
- 3) Data jumlah Anak yang tidak memenuhi syarat mendapatkan hak Remisi (*negative list*), jumlah asimilasi, pencabutan asimilasi, dan integrasi diperoleh dari rekapitulasi usulan remisi, asimilasi dan integrasi dari LPKA Kelas I Palembang selama periode Januari-Desember 2024.

Berdasarkan perhitungan di atas, indeks pembinaan khusus anak di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,42. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,42}{3,6} \times 100\% = 95\%$$

Capaian atas indikator indeks keberhasilan program pembimbingan klien masyarakat di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 95%.

g. Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah

Indeks derajat kesehatan dibagi ke dalam 3 dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Promotif dan Preventif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit.
- 2) Dimensi Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pengendalian penyakit dan atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

- 3) Dimensi Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ketiga dimensi tersebut diukur melalui:

**Tabel 25. Dimensi pada Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah**

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot
<b>I</b>	<b>Promotif dan Preventif</b>		<b>50%</b>
1	Pemenuhan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki status gizi dengan Kategori Baik terhadap total responden	5%
2	Pola hidup sehat	2.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	5%
3	Kesehatan lingkungan LAPAS/LPKA	3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA.	5%
4	Aktivitas/olahraga rutin	4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden.	5%
5	Upaya pengendalian penyakit menular	5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	5%
6	Deteksi dini penyakit	6.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	5%
7	Pemberian imunisasi/vaksin	7.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan imunisasi/vaksi sesuai kebutuhan terhadap total responden	5%
8	Pemberian obat pencegahan secara massal	8.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden	5%

No	Dimensi/Kriteria	Indikator	Bobot
	(jika tidak ada penyakit tropik yang terabaikan (Neglected Tropical Disease/NTD), capaian dianggap 100%)		
9	Fasilitas layanan kesehatan berizin	9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	5%
10	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	5%
<b>II</b>	<b>Kuratif</b>		<b>25%</b>
11	Penanganan penyakit pasien tahanan/narapidana/ anak (pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya)	11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit	25%
<b>III</b>	<b>Rehabilitatif</b>		<b>25%</b>
12	Rehabilitas pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hypertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika	12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hypertensi - Sakit DM - Sakit Jantung - Sakit Gangguan Mental - Rehabilitasi Narkotika	25%

Untuk rincian perhitungan indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 26. Perhitungan Indeks Derajat Kesehatan Anak, Tahanan dan Narapidana di Wilayah**

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
	<b>Promotif dan Preventif</b>						<b>50%</b>					

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	1.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang memiliki status gizi dengan Kategori Baik terhadap total responden	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan dengan status gizi kategori baik	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden	57	90	63.33	5%	0.03	0.46	3.84	3.6	106.7
2.	2.1 Persentase tahanan/narapidana a/ anak yang menjalankan pola hidup sehat sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang menjalankan pola hidup sehat	Total responden	80	90	88.89	5%	0.04				
3.	3.1 Persentase Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan sesuai ketentuan kebijakan dan regulasi yang berlaku terhadap total Lapas, Rutan dan LPKA.	Jumlah Lapas, Rutan dan LPKA yang menerapkan prinsip kesehatan lingkungan	Total Lapas, Rutan dan LPKA	20	20	100	5%	0.05				

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
4.	4.1 Persentase Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup terhadap total responden.	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang melakukan aktivitas fisik kategori cukup	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang menjadi responden	80	90	88.88888889	5%	0.04				
5.	5.1 Persentase tindakan pengendalian penyakit menular terhadap total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	Jumlah tindakan pengendalian penyakit menular	Total kasus penyakit menular yang pernah terjadi	2445	2445	100	5%	0.05				
6.	6.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala	Total responden	75	90	83.33	5%	0.04				
7.	7.1 Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan imunisasi/vaksi sesuai kebutuhan terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan imunisasi atau	Total responden	19	19	100	5%	0.05				

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
		vaksi sesuai kebutuhan										
8.	8.1 Persentase tahanan/narapidana a/ anak yang mendapat obat pencegahan massal sesuai kebutuhan terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan obat pencegahan massal sesuai kebutuhan	Total responden	0	0	100	5%	0.05				
9.	9.1 Persentase fasilitas layanan kesehatan berizin terhadap total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	Jumlah fasilitas layanan kesehatan berizin	Total fasilitas layanan kesehatan di seluruh RUTAN/LAPAS/LPKA yang menjadi sampel	19	20	95	5%	0.05				
10.	10.1 Persentase pasien tahanan/narapidana a/ anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat terhadap total responden	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat	Total Responden	31048	31048	100	5%	0.05				

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
<b>Kuratif</b>							<b>25%</b>					
11	11.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan penanganan penyakit terhadap total responden yang sakit	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan penanganan penyakit	Total responden yang sakit	48115	48141	99.95	25%	0.25	0.25			
<b>Rehabilitatif</b>							<b>25%</b>					
12	12.1 Persentase pasien tahanan/narapidana/ anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif terhadap total pasien tahanan/narapidana/ anak yang mengalami: - Sakit Paru-paru Kronis - Sakit Hypertensi - Sakit DM - Sakit Jantung	Jumlah tahanan atau narapidana atau anak yang mendapatkan tindakan rehabilitatif	Total responden	6566	6566	100	25%	0.25	0.25			

No	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi (%)	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
	- Sakit Gangguan Mental											
	- Rehabilitasi Narkotika											

Data-data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari sumber-sumber data berikut ini:

- 1) Data pemenuhan gizi, pola hidup sehat, kesehatan lingkungan, aktivitas olahraga rutin, dan deteksi dini penyakit diperoleh dari hasil survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rutan, Lapas, dan LPKA wilayah Sumatera Selatan. Survey dilakukan pada bulan Juni 2024 dan diisi oleh 90 (sembilan puluh) warga binaan sebagai sampel dari 20 (dua puluh) UPT Pemasarakatan wilayah Sumatera Selatan;
- 2) Data upaya pengendalian penyakit menular, pemberian obat pencegahan massal, fasilitas layanan kesehatan berizin, sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat, dan penanganan penyakit tahanan/narapidana/anak diperoleh dari rekapitulasi laporan bulanan dan triwulan terkait perawatan, kesehatan, dan rehabilitasi yang diisi oleh seluruh UPT Pemasarakatan wilayah Sumatera Selatan;
- 3) Data pemberian imunisasi/vaksin diperoleh dari laporan bulanan status gizi ibu hamil, bayi, dan anak binaan yang diisi oleh seluruh UPT Pemasarakatan wilayah Sumatera Selatan;
- 4) Data tahanan/narapidana yang mengikuti rehabilitasi narkotika diperoleh dari laporan bulanan rehabilitasi narkotika yang diisi oleh 4 (empat) UPT pamasarakatan penyelenggara rehabilitasi yaitu Lapas Kelas I Palembang, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Berdasarkan perhitungan di atas, indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,84.

Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,84}{3,6} \times 100\% = 106,67\%$$

Capaian atas indikator indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 106,67%.

h. Indeks keamanan dan ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan adalah indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga situasi aman dan kondusif pada UPT Pemasarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasarakatan dapat terselenggara dengan baik. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan terbagi menjadi ke dalam 4 (empat) dimensi, yaitu:

**Tabel 27. Dimensi pada Indeks Kemanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di Wilayah**

No	Indikator	Bobot
<b>1</b>	<b>Dimensi intelijen</b>	<b>10%</b>
	a. Kemampuan deteksi dini	10%
<b>2</b>	<b>Dimensi pencegahan</b>	<b>50%</b>
	a. Persentase kesiapsiagaan/mitigasi bencana alam	10%
	b. Persentase kegagalan upaya tindak pidana	10%
	c. Persentase pengeledahan blok hunian	10%
	d. Persentase pelaksanaan tes urin WBP	10%
	e. Persentase pelaksanaan tes urin petugas	10%
<b>3</b>	<b>Dimensi penindakan</b>	<b>20%</b>
	a. Persentase penanganan gangguan kamtib	10%
	b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam	10%
<b>4</b>	<b>Dimensi kepatuhan internal</b>	<b>20%</b>
	a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar	10%
	b. Persentase penegakan kode etik	10%

Untuk rincian perhitungan indeks keamanan dan ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 28. Perhitungan Indeks Kemanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasarakatan di Wilayah**

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
	<b>Dimensi intelijen</b>									<b>3.98</b>	3.6	110.6

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
1.	a. Kemampuan deteksi dini	Jumlah Lapas,LPKA dan Rutan yang berhasil meningkatkan status	Total Lapas,LPKA dan Rutan	19	20	95	10%	10	9.5			
<b>Dimensi pencegahan</b>							<b>50%</b>					
2.	a. Persentase kesiapsiagaan/ mitigasi bencana alam	Jumlah UPT yang memiliki rencana kontijensi penanganan bencana alam	Jumlah seluruh UPT	26	26	100	10%	10	49.99			
3.	b. Persentase kegagalan upaya tindak pidana	Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas	Jumlah kejadian tindak kriminal yang dilakukan oleh WBP	0	0	100	10%	10				
4.	c. Persentase penggeledahan blok hunian	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA yang melaksanakan penggeledahan sesuai standar	Jumlah Lapas,Rutan dan LPKA	20	20	100	10%	10				
5.	d. Persentase pelaksanaan tes urin WBP	Jumlah tes urin warga binaan dengan hasil negatif	Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap warga binaan	1,545	1,546	100	10%	10				

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
6.	e. Persentase pelaksanaan tes urin petugas	Jumlah tes urin petugas masyarakat dengan hasil negatif	Jumlah seluruh tes urin yang dilaksanakan terhadap petugas masyarakat	1,583	1,583	100	10%	10				
<b>Dimensi penindakan</b>							<b>20%</b>					
7.	a. Persentase penanganan gangguan kamtib	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang berhasil ditangani	Total gangguan keamanan dan ketertiban terjadi	13	13	100	10%	10	20			
8.	b. Persentase UPT yang melakukan pemulihan pasca gangguan kamtib dan bencana alam	Jumlah UPT Masyarakat yang melakukan pemulihan hingga kondusif	Jumlah UPT Masyarakat yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban serta bencana alam	10	10	100	10%	10				
<b>Dimensi kepatuhan internal</b>							<b>20%</b>					
9.	a. Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai standar	Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar	Jumlah pengaduan yang diterima	4	4	100	10%	10	20			

No.	Indikator	Numerator	Denominator	Nilai Numerator	Nilai Denominator	Realisasi	Bobot	Nilai Indikator	Nilai Dimensi	Nilai Indeks	Target 2024	Kinerja
10.	b. Persentase penegakan kode etik	Jumlah penegakan kode etik terhadap petugas yang melanggar	Jumlah petugas yang melakukan pelanggaran kode etik	0	0	100	10%	10				

Data-data yang dimasukkan ke dalam perhitungan di atas diperoleh dari laporan bulanan dan laporan insidentil di bidang keamanan dan ketertiban serta laporan hukuman disiplin dari bidang kepegawaian. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 3,96. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{3,98}{3,6} \times 100\% = 110,6\%$$

Capaian atas indikator indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 110,6%.

Berdasarkan perhitungan kedelapan dimensi di atas, maka diperoleh nilai indeks sebagai berikut:

**Tabel 29. Perhitungan Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah**

No.	Dimensi Penilaian	Nilai Indeks	Bobot (12,5%)
1.	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	3,88	0,49
2.	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	3,42	0,43
3.	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	2,95	0,37
4.	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	3,99	0,5
5.	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	6,58	0,82
6.	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	3,42	0,43
7.	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	3,84	0,48
8.	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	3,98	0,49
<b>Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah</b>		<b>32,06</b>	<b>4,01</b>

Berdasarkan perhitungan di atas, maka nilai indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 4,01. Adapun capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{4}{3,6} \times 100\% = 111,1\%$$

Capaian atas indikator indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah Sumatera Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 111,4%.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 hingga 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 30. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3,6 indeks	3,6 indeks	4 indeks	111,1

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Tercapainya target indikator indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah Sumatera Selatan didukung oleh sistem pelaporan yang cukup tertib, baik pada laporan bulanan, triwulan, maupun insidental dari setiap UPT Masyarakat wilayah Sumatera Selatan. Setiap operator laporan di Divisi Masyarakat berupaya untuk merekapitulasi dan mengevaluasi laporan yang masuk agar data-data yang dikirimkan ke unit pusat sudah sesuai, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penyebab keberhasilan pada setiap dimensi yang diukur adalah sebagai berikut:

- **Pelayanan Tahanan**

- a. Telah dilakukan Koordinasi dengan Aparat penegak Hukum yang berwenang sehingga dapat menurunkan tahanan yang overstaying yang ada pada Lapas/Rutan
- b. Berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi lainnya seperti Organisasi Bantuan Hukum setempat dalam melakukan penyuluhan hukum terhadap WBP

- **Basan dan Baran**

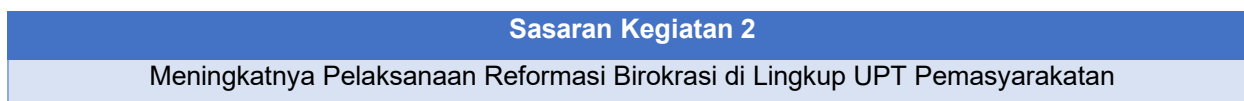
- a. Menjaga kualitas dan kuantitas basan dan baran dengan cara menempatkan basan baran sesuai klasifikasinya,

- b. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan basan dan baran sesuai kebutuhan
- c. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap basan dan baran yang telah memiliki kekuatan hukum
- **Pembinaan Narapidana**
  - a. Pemberian pembinaan yang baik dari seluruh petugas baik kepribadian atau kemandirian
  - b. Adanya penegakan aturan disiplin sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku
- **Pemenuhan Hak Narapidana**
  - a. Pemenuhan syarat administrasi dan substantif narapidana/anak yang sudah lengkap serta perilaku baik warga binaan berdasarkan penilaian oleh wali pemasyarakatan
- **Pembimbingan Klien Pemasyarakatan**
  - a. Sinergitas Klien pemasyarakatan dengan pihak Pembimbing Kemasyarakatan terkait wajib lapor
  - b. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap pembimbingan serta pengawasan pada klien pemasyarakatan
- **Pembinaan Khusus Anak**
  - a. Menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak ketiga untuk layanan pendidikan formal atau non formal serta pelatihan bersertifikat;
  - b. Pemasukan dari PNBK membantu terselenggaranya program pelatihan bersertifikat;
- **Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi**
  - a. Optimalisasi sosialisasi dan pendataan kepemilikan kartu BPJS pada Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA
  - b. Melakukan pengawasan terhadap perilaku pola hidup bersih dan sehat pada Warga Binaan
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan makanan melalui aplikasi Simonev Bama
  - d. Memberikan pelatihan jasa boga terhadap petugas dapur di UPT Pemasyarakatan
  - e. Memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan secara rutin
- **Keamanan dan Ketertiban**
  - a. Melakukan koordinasi dalam peningkatan keamanan baik di luar lapas maupun dalam lapas, seperti razia gabungan, bantuan pengawalan, pemindahan narapidana.
  - b. Adanya pengawasan/kontrol secara rutin oleh pelaksana petugas, pejabat pengawas sampai dengan kepala UPT untuk memastikan tidak ada gangguan kamtib.

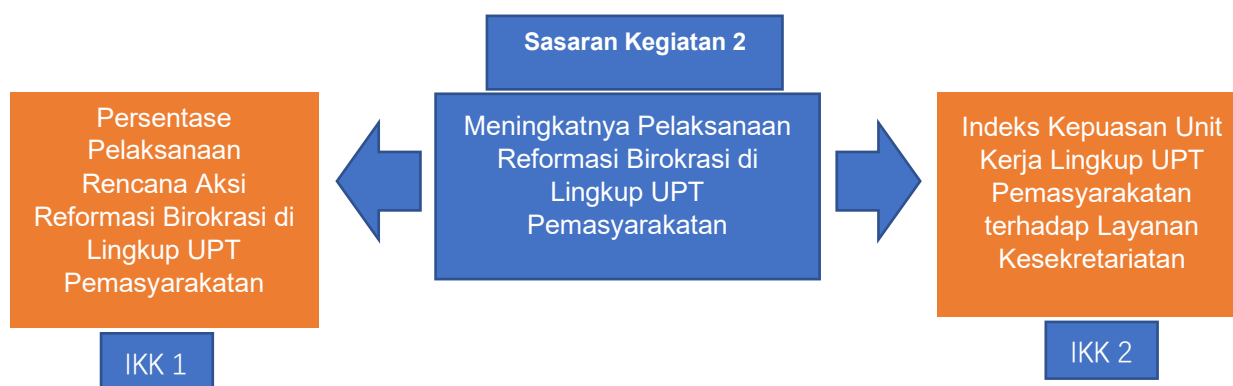
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk meningkatkan capaian kinerja khususnya pada indeks penegakan hukum masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, saran tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi yang berkelanjutan dengan Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan pelayanan tahanan, rehabilitasi narkoba, gangguan keamanan dan ketertiban.
- b. Kerjasama yang berkelanjutan dengan para stakeholder di berbagai bidang terkait guna memaksimalkan capaian setiap target program di lingkup Masyarakat baik di tingkat Kantor Wilayah maupun tingkat UPT Masyarakat di daerah.



**Gambar 6. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat”**

- 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 31. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	100%	100

Untuk indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Masyarakat dihitung dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

% Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

$$X = \frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$$

53

Sehingga capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan.pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 32. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian tahun 2024 untuk indikator ini tercapai, yakni telah terealisasi sebesar 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Tercapainya target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan adalah karena adanya komitmen dari jajaran UPT Pemasarakatan wilayah Sumatera Selatan dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Pemasarakatan maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, jajaran UPT Pemasarakatan juga perlu berfokus pada asas kebermanfaatan dari pelaksanaan rencana aksi RB ini untuk masyarakat, bukan hanya berfokus pada pelaksanaannya saja.

### **Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: “Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan”**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 33. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	2,09 indeks	67,4

Untuk indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan dihitung berdasarkan Indeks Layanan Kesekretariatan di lingkungan UPT Pemasyarakatan pada Kanwil Sumsel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 34. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI
1.	Lapas Kelas I Palembang	1
2.	LPKA Kelas I Palembang	3,82
3.	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	3,45
4.	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	2,64
5.	Lapas Kelas IIA Lahat	3,1
6.	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	1,69
7.	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	3,19
8.	Lapas Kelas IIA Banyuasin	0
9.	Lapas Kelas IIB Muara Enim	0
10.	Lapas Kelas IIB Sekayu	3,28
11.	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	3,65
12.	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	0,4
13.	Lapas Kelas IIB Martapura	3,11
14.	Lapas Kelas IIB Muara Dua	3,17
15.	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	0
16.	Lapas Kelas III Surulangun Rawas	2,51
17.	Lapas Kelas III Pagar Alam	0
18.	Rutan Kelas I Palembang	0,6
19.	Rutan Kelas II Prabumulih	3,91
20.	Rutan Kelas II Baturaja	2,5
21.	Bapas Kelas I Palembang	1,6
22.	Bapas Kelas II Lahat	1,2
23.	Bapas Kelas II OKU Induk	3,13
24.	Bapas Kelas II Muratara	2,9
25.	Rupbasan Kelas I Palembang	0,6
26.	Rupbasan Kelas II Baturaja	3,11
<b>RATA-RATA</b>		<b>2,09</b>

Sehingga capaian atas indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{2,09}{3,1} \times 100\% = 67,4\%$$

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,1 indeks	2,09 indeks	67,4

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan tidak mencapai target yakni hanya diperoleh sebesar 2,09 indeks dari target 3,1 indeks.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab kegagalan

Kendala yang muncul dalam mewujudkan indikator kinerja kegiatan adalah minimnya partisipasi dari pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan untuk berpartisipasi dalam penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024. Bahkan terdapat 4 (empat) UPT Pemasarakatan yang tidak berpartisipasi dalam penilaian tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, jajaran UPT Pemasarakatan juga perlu berinovasi dalam memberikan layanan sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu adanya program peningkatan kapasitas atau pengembangan diri khususnya bagi petugas yang terkait agar dapat lebih optimal dalam memberikan layanan dan memunculkan kepuasan bagi masyarakat.

- Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi

Capaian kinerja Divisi Keimigrasian terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dan 5 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

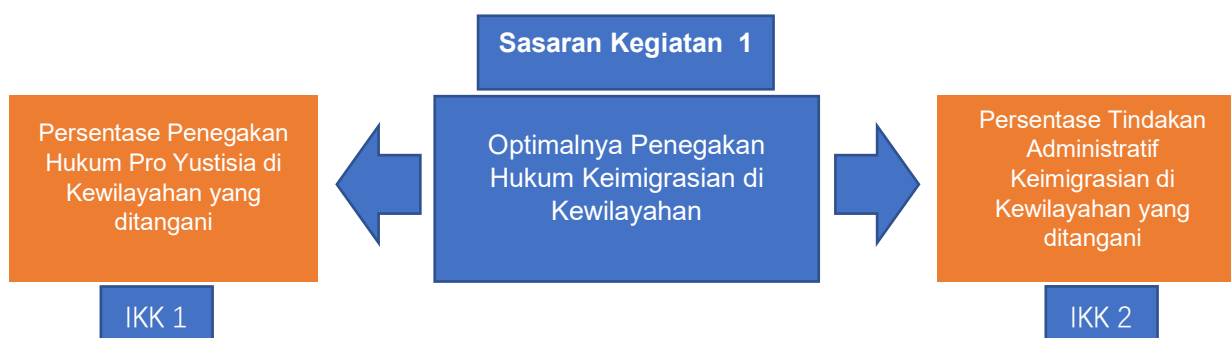
**Tabel 36. Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian/Direktorat Jenderal Imigrasi**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase Penegakan Hukum ProYustisia di Wilayah yang ditangani	90%	100%	111,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%	100%	111,11
3	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	111,11
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	-	-

**Sasaran Kegiatan 1**  
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

**Gambar 7. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 37. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11%

Selama Tahun 2024, tidak terdapat kasus pelanggaran hukum keimigrasian sehingga persentase penegakan yustisia di kewilayahan yang ditangani berjumlah 100%.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%	90%	100%	111,11%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Tidak ada kasus pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 maka realisasi pada indikator ini adalah 100%.

- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
- Penyebab kegagalan  
Tidak tercapainya indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan tidak adanya kasus pelanggaran hukum keimigrasian sehingga persentase penegakan yustisia di kewilayahan yang ditangani berjumlah 0.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Dalam hal pengawasan orang asing di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Sumatera Selatan terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan di antaranya dilakukannya rapat Timpora tingkat Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya guna bertukar informasi dengan instansi penegak hukum lainnya dan juga dilakukannya operasi mandiri secara berkesinambungan di wilayah Sumatera Selatan.

**Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani**

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 39. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%	100%	111,11

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$X = \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Administrasi Keimigrasian Yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus Pelanggaran Administrasi Keimigrasian Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$X = \frac{19 \text{ Kasus}}{19 \text{ Kasus}} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Selama Tahun 2024 terdapat 6 orang asing yang melakukan pelanggaran administrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan sebanyak 13 orang asing yang melakukan pelanggaran administrasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim. Adapun total sebanyak 19 orang asing tersebut sudah ditindaklanjuti, sehingga persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani yaitu 100%.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 40. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani	90%	90%	100%	111,11

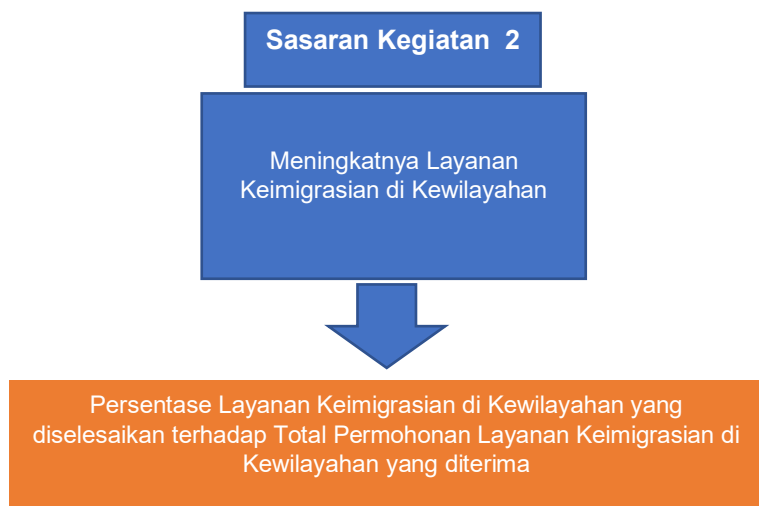
Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani telah terlampaui, dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan
  - a) Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
  - b) Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
  - c) Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;

- d) Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat provinsi baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
  - e) Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Dalam hal pengawasan orang asing di wilayah kerja Divisi Keimigrasian Sumatera Selatan terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan, di antaranya dilakukan pengawasan intelijen untuk menentukan target operasi. Setelah itu dilakukan operasi mandiri pengawasan orang asing dan apabila ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian maka dilaksanakan penegakan hukum keimigrasian. Di samping itu, juga dilaksanakan rapat Timpora tingkat Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun guna bertukar informasi dengan instansi penegak hukum lainnya.



**Gambar 8. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima**

- 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 41. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian	90%	100%	111,11

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		di Kewilayahan yang diterima			

Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan keimigrasian yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{88176}{88176} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

**Tabel 42. Rekapitulasi Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan dan Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024**

Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Layanan	Jumlah Layanan yang Diselesaikan
Penerbitan paspor 48 halaman	85.530	85.530
Penerbitan izin tinggal kunjungan	823	823
Penerbitan izin tinggal terbatas	1.117	1.117
Penerbitan izin tinggal tetap	18	18
Penerbitan izin tinggal keimigrasian lainnya	688	688
<b>TOTAL</b>	<b>88.176</b>	<b>88.176</b>

Selama Tahun 2024 terdapat total sebanyak 88176 permohonan pelayanan keimigrasian di wilayah kerja Sumatera Selatan dan semua permohonan tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian, Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima pada periode Tahun 2024 adalah 100%.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 43. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

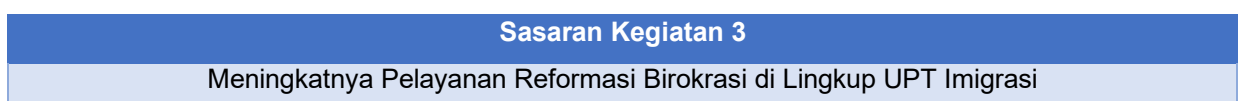
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan	90%	90%	100%	111,11

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
		terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima				

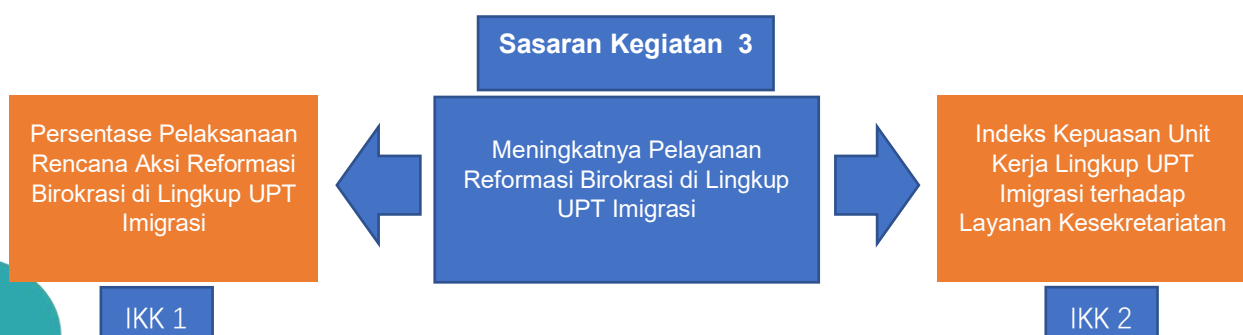
Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani telah terlampaui, dengan realisasi sebesar 100% dari target 90%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Terjalinnnya Kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat menyebabkan kemudahan masyarakat dalam menikmati pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Muara Enim. Di samping itu, adanya berbagai inovasi yang sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan keimigrasian dan menunjang nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - a) Peluncuran e-visa sebagai implementasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
  - b) Peluncuran program layanan "LAKSO" yaitu Layanan Keimigrasian *On the Spot* yang merupakan program pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar Kantor Imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan Unit Paspor Mobile.
  - c) Peluncuran program layanan "LAKSAN" yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Minggu.
  - d) Peluncuran program layanan "SIPINDANG" yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
  - e) Peluncuran program layanan "LANGSING" yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian ber-*barcode* yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.
  - f) Peluncuran Inovasi "SIGITA", yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip yang memback up data-data pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki data *hard copy* dan *soft copy* dari pemohon paspor sehingga hal ini akan menjadi lebih aman dan mudah ditemukan saat diperlukan.
  - g) Peluncuran program layanan "BELIDA" yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang tetap dilaksanakan pada saat jam istirahat.
  - h) Peluncuran program layanan "AMPERA" yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian.

- i) Peluncuran program layanan 'CELIMPUNGAN' yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspur sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses pembuatan paspor yang mereka ajukan.
- j) Peluncuran program layanan 'SIBANGKIT', yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit yang dilaksanakan di tempat dimana pemohon dirawat.
- k) Peluncuran program layanan 'SIGEP' yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem atau kelalaian petugas, sehingga paspor akan diantar ke tempat pemohon paspor tinggal.
- l) Peluncuran inovasi 'MALBI' yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja yang menyediakan informasi terupdate mengenai anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
- m) Optimalnya penyebaran informasi keimigrasian melalui banner, media sosial, *website*, cetak, dan elektronik serta di tempat umum.
- n) Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti.
- o) Penerapan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemohon.
- p) Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Kantor Pos yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
- q) Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai Keimigrasian.
- r) Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Bank Negara Indonesia (BNI), dalam hal ini yaitu Penempatan ATM BNI yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam pengambilan uang guna mempermudah melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
- s) Adanya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi sehingga hal ini sangat membantu Masyarakat setempat atau daerah sekitar yang ingin mendapatkan layanan keimigrasian, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke Kantor Imigrasi dan hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepuasan masyarakat akan layanan Keimigrasian.



**Gambar 9. Sasaran Kegiatan 3 Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi Yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$x = \frac{53}{53} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 45. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	100

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100% dan telah tercapai pada Tahun 2024.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian adalah karena adanya komitmen dari jajaran UPT Keimigrasian wilayah Sumatera Selatan dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan UPT Keimigrasian.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, jajaran UPT Keimigrasian juga perlu berfokus pada asas kebermanfaatan dari pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi ini untuk masyarakat, bukan hanya berfokus pada pelaksanaannya saja.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3.2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 46. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	-	-

Sesuai dengan surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPH-LT.04.01-28 tanggal 15 Oktober 2024 Hal Hasil Pengisian Aplikasi dan Penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) Tahun 2024, Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan Sumatera Selatan yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim masuk ke dalam daftar Unit Pelaksana Teknis yang belum melakukan penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan Periode Tahun 2024. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan realisasi dan target pada indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 47. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,1 indeks	-	-

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT

Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan adalah 3,1 indeks dan tidak tercapai pada tahun 2024 ini.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab kegagalan

Tidak tercapainya indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian di lingkungan Sumatera Selatan yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim masuk ke dalam daftar Unit Pelaksana Teknis yang belum melakukan penilaian Indeks Layanan Kesekretariatan Periode Tahun 2024. Dengan demikian, tidak dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan realisasi dan target pada indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk memaksimalkan dan menjaga kualitas kepuasan unit kerja lingkup UPT Keimigrasian terhadap layanan kesekretariatan maka perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dari pihak-pihak yang terkait. Selain itu, jajaran UPT Keimigrasian juga perlu berinovasi dalam memberikan layanan sehingga lebih efektif dan efisien, serta perlu adanya program peningkatan kapasitas atau pengembangan diri khususnya bagi petugas yang terkait agar dapat lebih optimal dalam memberikan layanan dan memunculkan kepuasan bagi masyarakat.

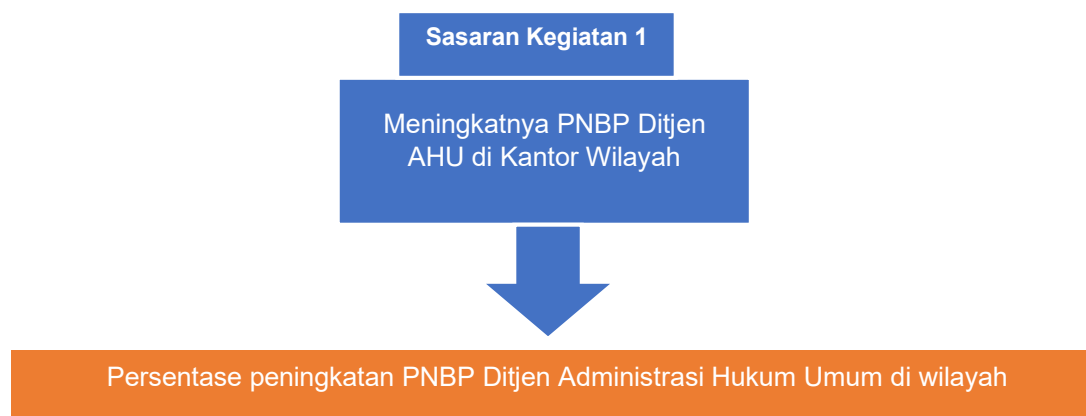
- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) Kantor Wilayah  
Capaian Kinerja Direktorat Jenderal AHU pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 48. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	-34,17%	-569,5
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11

<b>Sasaran Kegiatan 1</b>
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Gambar 10. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	-34,17%	-569,5

Untuk menghitung capaian indikator ini, perlu diketahui jumlah PNBP untuk layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah Sumatera Selatan pada tahun lalu dan tahun berjalan. Adapun total PNBP Tahun 2023 adalah sebesar Rp 12.486.600.000 sedangkan total PNBP Tahun 2024 adalah. Rp 8.219.700.000

**Tabel 50. Perhitungan Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	Jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBP tahun sebelumnya, dikali 100% $\frac{Rp\ 8.219.700.000 - Rp\ 12.486.600.000}{Rp\ 12.486.600.000} \times 100\% = -34,17\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{-34,17\%}{6\%} \times 100\% = -569,5\%$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 51. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	Target	-	5%	5%	5%	6%
		Realisasi	-	5%	-0,39%	-18,12%	-34,17%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
	Capaian	-	100%	-7,8%	-362,4%	-569,5%

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut di atas, PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja terus meningkat setiap tahun. Adapun pada Tahun 2020, tidak terdapat indikator kinerja tersebut pada Perjanjian Kinerja.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 52. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah	6%	6%	-34,17%	-569,5

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan PNBP Ditjen Administrasi Hukum Umum di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab kegagalan

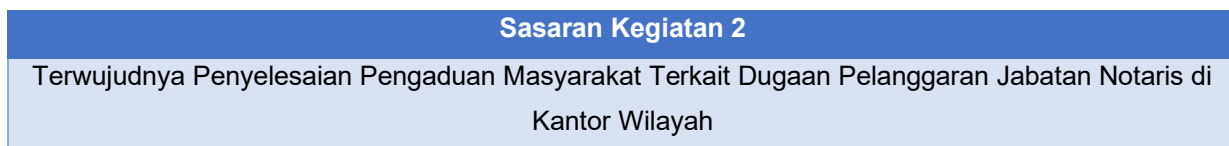
Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja pada tahun 2024, yakni penurunan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah pada tahun 2024 menyebabkan tidak daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan PNBP fidusia menurun.

Meski demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan senantiasa berupaya meningkatkan PNBP AHU dengan cara menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan edukasi layanan jasa hukum serta memberikan informasi secara luas kepada masyarakat melalui radio daerah dan ikut serta dalam rangkaian kegiatan daerah yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan juga menyediakan pendampingan secara langsung bagi masyarakat dalam pengajuan permohonan layanan jasa AHU yang berada pada bagian Layanan Terpadu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

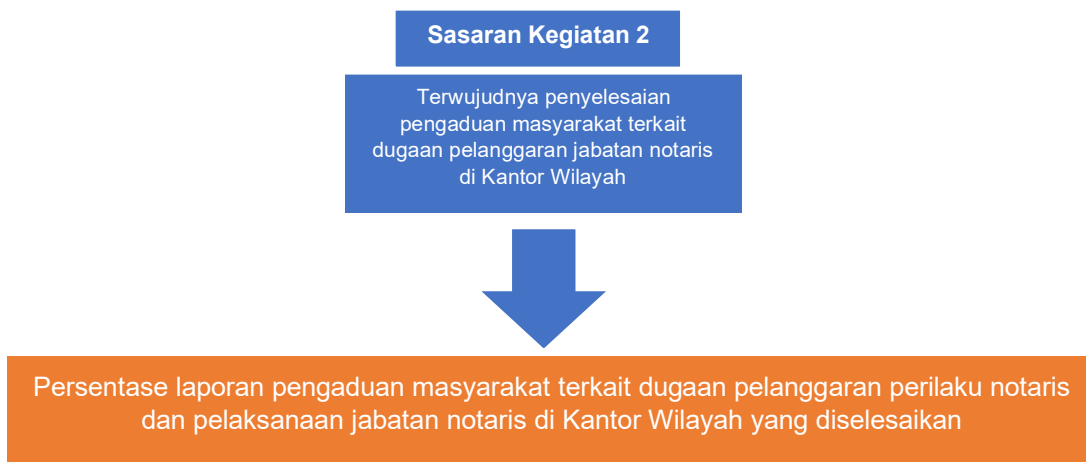
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, pimpinan senantiasa menginformasikan dan mengingatkan kepada pegawai khususnya pada layanan hukum untuk tetap menjaga

sikap Professional, Akuntabel, Sinergitas, Transparan, dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Hal tersebut disampaikan melalui apel pegawai, rapat evaluasi setiap akhir bulan, maupun media *WhatsApp Group* Kantor Wilayah.



**Gambar 11. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 53. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	111,11

**Tabel 54. Perhitungan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris	90%	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk, dikali 100%  $\frac{5 \text{ laporan diselesaikan}}{5 \text{ laporan diterima}} \times 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

di Kantor Wilayah	dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan		= 100%	
-------------------	---	--	--------	--

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah mencapai 100%. Dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Desember 2024, telah masuk sebanyak 5 laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah dan semuanya telah diselesaikan/ditangani, yaitu:

- 1) Laporan pengaduan terhadap notaris Aryani Kumalasari, S.H., M.Kn  
Telah ditindaklanjuti dengan hasil teguran tertulis
- 2) Laporan pengaduan terhadap notaris Ida Kumala Desi, S.H., M.Kn  
Telah ditindaklanjuti dengan hasil teguran tertulis
- 3) Laporan pengaduan terhadap notaris Denny Pratama, S.H., M.Kn  
Telah ditindaklanjuti dengan hasil pemberhentian sementara selama 3 bulan
- 4) Laporan pengaduan terhadap notaris Fitri Yuliana, S.H., M.Kn  
Telah ditindaklanjuti dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran kode etik
- 5) Laporan pengaduan terhadap notaris Hafiz, S.H., M.Kn  
Telah ditindaklanjuti dengan hasil tidak ditemukan pelanggaran kode etik

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 55. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	Target	-	82%	84%	86%	90%
		Realisasi	-	82%	100%	100%	100%
		Capaian	-	100%	119%	116%	111,11%

Tidak terdapat indikator persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun pada Tahun 2024, terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat kenaikan target. Meski demikian, realisasi kinerja yang dicapai telah memenuhi target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	90%	100%	111,11

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak memiliki perbandingan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target tersebut dikarenakan peran aktif seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat dan didukung dengan sekretariat majelis yang bertindak sigap.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah didukung oleh tindaklanjut terhadap seluruh laporan masyarakat yang masuk baik melalui MPDN, dan MPWN, serta MKNW secara efektif dan efisien sehingga proses penyelesaiannya dapat berjalan tepat waktu.

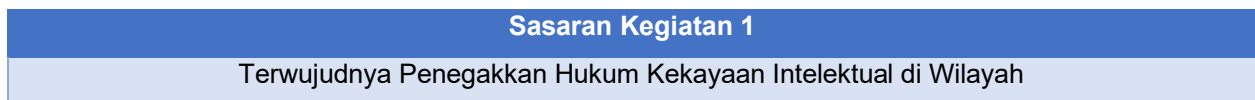
- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal KI (Kekayaan Intelektual) Kantor Wilayah

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 57. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	84,63%	120,9
		Persentase Peningkatan Permohonan	20%	23,86%	119,3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kekayaan Intelektual di Wilayah			



**Gambar 12. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

**Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 58. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	-	-

Capaian kinerja kegiatan penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah didapat atas pengaduan dari masyarakat maupun instansi terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dialaminya. Pengaduan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Adapun capaian tersebut dihitung dengan cara Jumlah laporan yang diselesaikan dibagi jumlah laporan yang masuk dikali 100%. Adapun pada tahun 2024 tidak terdapat aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 59. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
		Target	-	100%	100%	100%	30%
1	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	Realisasi	100%	100%	100%	100%	NIHIL
		Capaian	100%	100%	100%	100%	-

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, tidak terdapat indikator persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Adapun capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah stabil yaitu 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 60. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	-	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis indikator Kinerja Kegiatan terkait Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sudah tercapai dengan baik.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Bahwa dalam upaya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah telah didukung dengan adanya 3 (tiga) PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sehingga Kantor Wilayah bisa melakukan tindaklanjut apabila ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk. Data PPNS yang ada di Kantor Wilayah Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 61. Data PPNS Kekayaan Intelektual**

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
1	Yulkhaidir, S.H.	197807212005011001	2009
2	Tri Santo Bonifasto Simanjuntak, S.H.	198602162019011001	2021

No	Nama	NIP	Tahun Pelantikan PPNS
3	Dio Gestianda, S.H.	199201282010121002	2022

Data pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 62. Data Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual**

No	Kasus	Tahun	Status
1	Pemalsuan Pelumas Oli Motor Merek <b>AHM (Astra Honda Motor)</b>	2022	Selesai
2	Pemalsuan Minyak Nabati Merek <b>New ZNNI Cap 4 Tongkat</b>	2023	Selesai
3	Pemalsuan Pelumas Merek <b>Federal Oil</b>	2023	Selesai
4	Pemalsuan Merek <b>Ositech</b>	2023	di limpahkan ke pusat

Tahun 2020 dan 2021 belum ada pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk karena belum terbangunnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Tahun 2022, terdapat 1 (satu) pengaduan pelanggaran KI dari PT. Astra Honda Motor terkait dengan peredaran produk palsu berupa pelumas oli motor merek **AHM**, saat ini kasus sudah diselesaikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menetapkan 1 (satu) orang tersangka pemalsuan.

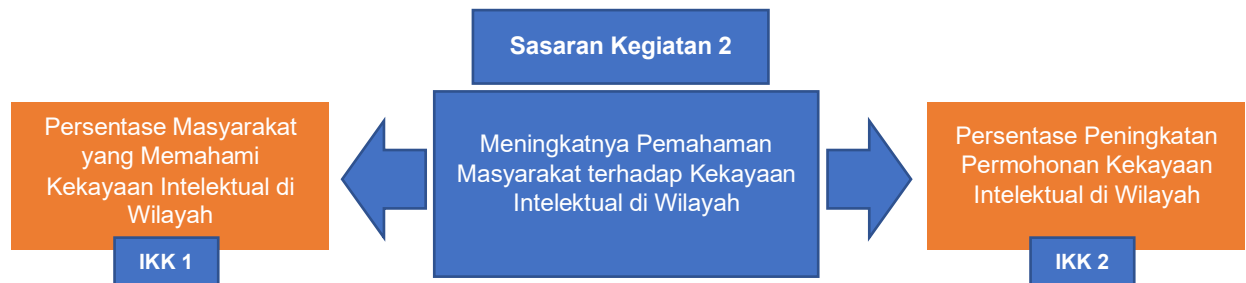
Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) pengaduan pelanggaran KI, pertama dari pemilik merek **Cap Empat Tongkat** mengadukan terkait peredaran produk minyak urut miliknya terjual bebas di Toko Sakinah tanpa sepengetahuan pemilik sehingga pemilik mengalami kerugian. Saat ini kasus sudah diselesaikan oleh Kepolisian dan menetapkan 1 (satu) orang tersangka. Kedua pengaduan dari Exxon Mobil Corporation terkait pemalsuan pelumas oli merek **Federal Oil**. Saat ini kasus sudah diselesaikan oleh Kepolisian dan menetapkan 1 (satu) orang tersangka. Ketiga, pengaduan KI dari pemilik merek **Ositech** yang mereknya digunakan oleh pihak lain, namun pihak terlapor berkedudukan di Kabupaten Bantul Provinsi Yogyakarta sehingga untuk penyelesaian sengketa dilakukan oleh unit pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan edukasi pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga dapat menurunkan potensi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan juga meningkatkan metode penyelesaian dengan adanya sinergitas dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.

**Sasaran Kegiatan 2**  
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

**Gambar 13. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 63. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	84,63%	120,9

Capaian kinerja kegiatan didapat berdasarkan jumlah peserta yang memahami substansi materi Kekayaan Intelektual baik secara umum maupun secara khusus, penangambilan data dilakukan melalui *Post Test* yang berisikan pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh narasumber, selanjutnya peserta yang memenuhi ambang batas dengan nilai 70 akan dianggap memahami materi Kekayaan Intelektual. Capaian kinerja tersebut dihitung dengan cara Jumlah masyarakat yang memahami KI dibagi jumlah seluruh masyarakat yang mengikuti sosialisasi/diseminasi dikali 100%.

$$\frac{1041 \text{ orang yang memahami}}{1230 \text{ orang yang mengikuti}} \times 100\% = 84,63\%$$

Data jumlah peserta diambil dari kegiatan promosi, diseminasi Kekayaan Intelektual ataupun edukasi pencegahan pelanggaran KI dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 64. Data Kegiatan Promosi, Diseminasi, Edukasi Tahun 2024**

No	Kegiatan	Waktu dan Tempat	Peserta	Jumlah Peserta yang Paham	Persentase
1	Promosi Diseminasi Indikasi Geografis	Hotel Harper 19 – 21 Februari 2024	100 org	91 org	91%
2	Promosi Diseminasi Desain Industri	Hotel The Zuri 5 Maret 2024	100 org	87 org	87%
3	Promosi Diseminasi IG dan Merek Kolektif	Hotel Aryaduta 7 Maret 2024	100 org	85 org	85%

No	Kegiatan	Waktu dan Tempat	Peserta	Jumlah Peserta yang Paham	Persentase
4	Promosi Diseminasi Penelusuran dan Drafting Paten	Hotel Aston 25 April 2024	100 org	80 org	80%
5	Promosi Diseminasi KI Komunal	Hotel Novotel 14 Mei 2024	100 org	86 org	81%
6	Mobile IP Clinic	Hotel Aryaduta 19-21 Juni 2024	100 org	93 org	93%
7	Patent One Stop Service	PT Butik Asam, Bappedalitbang Muara Enim dan Universitas Sriwijaya	300 org	246 org	82%
8	Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait HKI yang diselenggarakan oleh Balitbang OKU	Hotel Kemuning Baturaja 25 Juli 2024	69 org	60 org	87%
9	Sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh Balitbang OKI	Balitbang OKI 27 Agustus 2024	40 org	31 org	77,5%
10	Sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Lubuklinggau	Hotel Dewinda Lubuklinggau 28 Agustus 2024	46 org	39 org	84,78%
11	Sosialisasi KI yang diselenggarakan oleh Bappedalitbang OKU Timur	Aula Bappedalitbang OKU Timur 24 September 2024	75 org	60 org	80%
12	Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI bagi Perguruan Tinggi	Hote The Zuri Palembang 22 Juli 2024	100 org	83 org	83%
<b>TOTAL</b>			<b>1.230 org</b>	<b>1.041 org</b>	<b>84,63%</b>

Tahun 2024 telah dilakukan 12 kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual serta Edukasi Pencegahan dan Pelanggaran KI dengan total peserta sekitar 1.230 orang peserta, telah dilakukan post test pada setiap kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta berjumlah 1.041 orang peserta memahami atau dengan kata lain sebanyak 84,63% peserta memahami Kekayaan Intelektual.

- Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 65. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan	70%	70%	84,63%	120,9

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
		Intelektual di Wilayah				

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi kinerja indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah telah memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman Kekayaan Intelektual kepada masyarakat yakni dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan terkait dengan substantif Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga pemahaman masyarakat dapat terus meningkat, ditunjang dengan kegiatan penyebarluasan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan lain seperti Klinik KI, *podcast*, *talkshow*, dan kegiatan lainnya yang bisa memberikan informasi KI kepada masyarakat dengan data sebagai berikut:

**Tabel 66. Data Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kekayaan Intelektual**

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat
1	Klinik KI Bergerak	24-26 April 2024	Palembang Indah Mall
2	Podcast Kekayaan Intelektual	18 April – 26 April 2024	Kantor Wilayah
3	Talkshow Merek Kolektif di Radio Sonora FM	16 April 2024	Radio Sonora
4	Stand Klinik KI pada Kegiatan Kadin Expo	11-14 Juli 2024	Transmart Palembang
5	Stand Klinik KI pada Kegiatan Legal Expo	2-4 Agustus 2024	Palembang Indah Mall

### Indikator Kinerja Kegiatan 2.2: Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 67. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	23,86%	119,3

Capaian kinerja kegiatan didapat berdasarkan jumlah permohonan kekayaan intelektual di Provinsi Sumatera Selatan, data diambil dari Aplikasi Dashboard Monitoring Permohonan

Kekayaan Intelektual <https://dashboardmonitoring.dgip.go.id>. Adapun capaian kinerja tersebut dihitung dengan cara Jumlah Permohonan tahun sekarang dikurangi jumlah permohonan sebelumnya, dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya dikali 100%.

$$\frac{4050 \text{ Permohonan Tahun 2024} - 3270 \text{ Permohonan Tahun 2023}}{3270 \text{ Permohonan Tahun 2023}} \times 100\% = 23,86\%$$

**Tabel 68. Data Permohonan Kekayaan Intelektual**

Jenis	Tahun				
	'2020	'2021	'2022	'2023	'2024
Hak Cipta	1505	1715	2397	2504	2884
Merek	512	403	549	667	1077
Paten	37	71	66	65	75
Desain Industri	43	27	6	34	9
DTLST	0	0	0	0	3
Rahasia Dagang	0	0	0	0	0
Indikasi Geografis	2	1	0	0	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2099</b>	<b>2217</b>	<b>3018</b>	<b>3270</b>	<b>4050</b>
Persentase Peningkatan dari Tahun Sebelumnya	-	5,62%	36,12%	8,35%	23,86%

Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual berfluktuasi setiap tahunnya, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024.

**Tabel 69. Data Permohonan Kekayaan Intelektual Komunal**

Jenis	Tahun					TOTAL
	'2020	'2021	'2022	'2023	'2024	
Ekspresi Budaya Tradisional	9	2	21	13	117	162
Pengetahuan Tradisional	0	0	24	4	3	31
Sumber Daya Genetik	0	0	0	0	0	0
Potensi Indikasi Geografis	0	0	0	0	1	1
Indikasi Asal	0	0	0	1	0	1
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>18</b>	<b>121</b>	<b>192</b>

Pada jangka waktu rencana strategis 2020 s.d. 2024 data permohonan Kekayaan Intelektual berjumlah 192 permohonan yang telah didaftarkan.

**Tabel 70. Data Indikasi Geografis**

No	Nomor IG	Nama IG	Pemilik
1	000000035 20 Oktober 2015	Kopi Robusta Semendo	MPIG Apit Jurai
2	000000055 10 Februari 2017	Kopi Robusta Empat Lawang	Perhimpinan Petani dan Pengusaha Kopi Empat Lawang
3	000000057 7 April 2017	Duku Komering	MPIG Duku Komering Sumatera Selatan
4	000000094 13 Mei 2020	Kopi Robusta Pagar Alam	MPIG Kopi Robusta Pagar Alam
5	000000117 1 Februari 2023	Gambir Toman Musi Banyuasin	MPIG Gambir Gindesugi Muba
6	000000093 25 September 2023	Kopi Robusta OKU Selatan	MPIG Kopi Robusta Oku Selatan

No	Nomor IG	Nama IG	Pemilik
7	0000000146 23 Agustus 2024	Kopi Robusta Lahat	MPIG Jurai Tue
8	Proses	Jeruk Gerga Pagaram	MPIG Jeruk Gerga Pagaram
9	Proses	Nanas Prabumulih	MPIG Nanas Prabumulih

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 71. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	20%	23,86%	119,3

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah telah mencapai target yang telah ditentukan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan terkait Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah didukung oleh upaya-upaya yang telah dilakukan seperti melakukan jemput bola ke masyarakat melalui kegiatan seperti Klinik KI, *podcast*, *talkshow* dan kegiatan lainnya yang bisa memberikan informasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual sangat berkorelasi dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual, sehingga Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual harus rutin dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga pemahaman masyarakat dapat terus meningkat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh stakeholder internal juga sangat berpengaruh dalam peningkatan permohonan KI di wilayah.

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal PP (Peraturan Perundang-Undangan) Kantor Wilayah Capaian kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

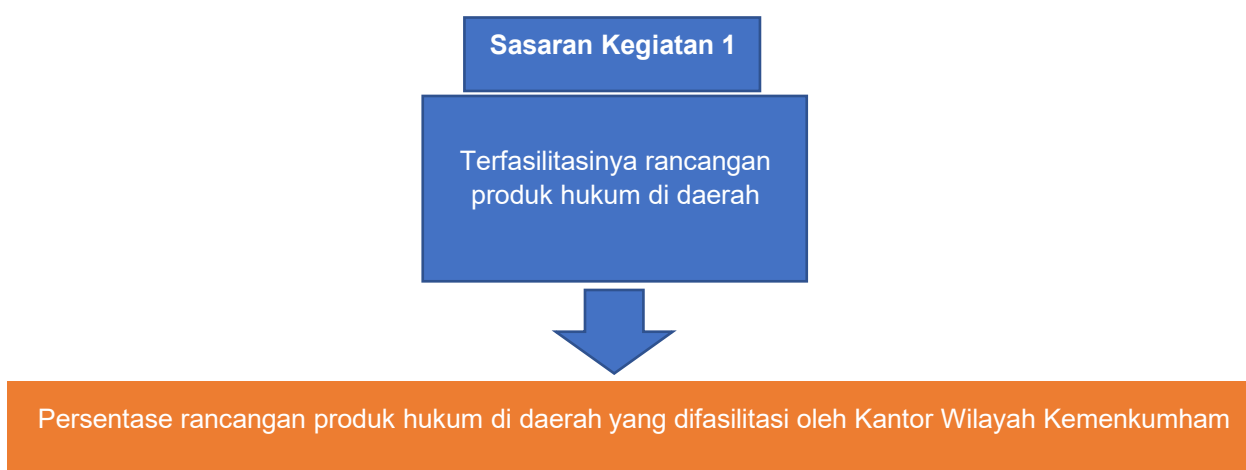
**Tabel 72. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125
2	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 orang	21 orang	100

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

**Gambar 14. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 73. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125

Target yang harus dicapai untuk indikator ini dalam kurun waktu 1 (satu) tahun adalah 80%. Sedangkan realisasi yang diperoleh adalah 100% yaitu dihitung berdasarkan dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase fasilitasi Perda} = \frac{\text{Jumlah Perda yang selesai diharmonisasi}}{\text{Jumlah permintaan harmonisasi Perda}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase fasilitasi Perda} = \frac{707}{707} \times 100\% = 100\%$$

Adapun rekapitulasi jumlah Perda yang telah dilaksanakan harmonisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 74. Rekapitulasi Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2024**

NO.	DAERAH	JUMLAH RANPERDA/RANPERKADA						TOTAL
		RAPERDA PROV (DPRD)	RAPERDA PROV (PEM PROV)	RAPERDA KAB/KOTA (DPRD)	RAPERDA KAB/KOTA (PEM KAB/KOTA)	RAPERKADA PROVINSI	RAPERKADA KAB/KOTA	
1	Provinsi Sumatera Selatan		4			42		46
2	Kota Palembang			1	2		73	76
3	Kab. Muara Enim				7		19	26
4	Kab. OKI				7		39	46
5	Kab. OKU Selatan				3		27	30
6	Kab. Musi Rawas				5		38	43
7	Kab. Musi Banyuasin			6	2		8	16
8	Kota Lubuk Linggau			10			32	42
9	Kab. Ogan Ilir				1		52	53
10	Kab. Empat Lawang				1		23	24
11	Kota Pagar Alam				1		22	23
12	Kab. OKU Timur				1		32	33
13	Kab. PALI				2		31	33
14	Kab. Banyuasin				5		48	53
15	Kab. OKU				5		13	18
16	Kota Prabumulih						36	36
17	Kab. Lahat				5		68	73
18	Kab. Muratara				2		34	36
<b>Sub Total</b>			4	17	49	42	595	707
<b>TOTAL</b>		<b>707</b>						

- Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 75. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	Target	80%	80%	80%	80%	80%
		Realisasi	80%	80%	80%	100%	100%
		Capaian	100%	100%	100%	125%	125%

Sebagaimana pada tabel di atas, capaian indikator kinerja persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham stabil dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan terjadi sedikit kenaikan capaian pada tahun 2023 dan 2024.

- Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%	100%	125

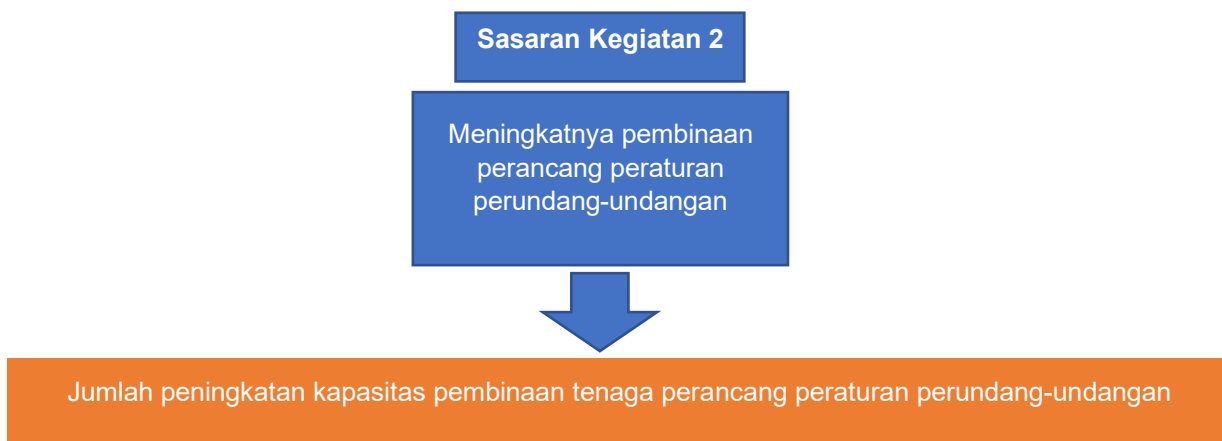
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham telah melampaui target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
5. Penyebab keberhasilan
  - Adanya dukungan anggaran dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah;
  - Adanya koordinasi yang intensif dan bersinergis dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
  - Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota;
  - Memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Gambar 15. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



**Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 77. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 org	21 org	100

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan telah terealisasi sesuai dengan target yakni dengan jumlah 21 orang perancang peraturan perundang-undangan. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan kegiatan pembinaan perancang Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan oleh Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 78. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undngan	Target	23	36%	23	23	21
		Realisasi	23	36%	23	21	21
		Capaian	100	100%	100	91,30	100%

Sebagaimana yang dimaksud dalam tabel di atas, capaian kinerja untuk indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan target.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 79. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	21 org	21 org	21 org	100

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja kegiatan jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini ialah karena telah dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah pada Hari Rabu Tanggal 20 Juni 2024 yang diikuti oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan adanya koordinasi yang intensif dan bersinergi dengan Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota serta Badan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dapat menjadi salah satu upaya untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja ini.

- Capaian Kinerja BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kantor Wilayah

Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 4 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 80. Capaian Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

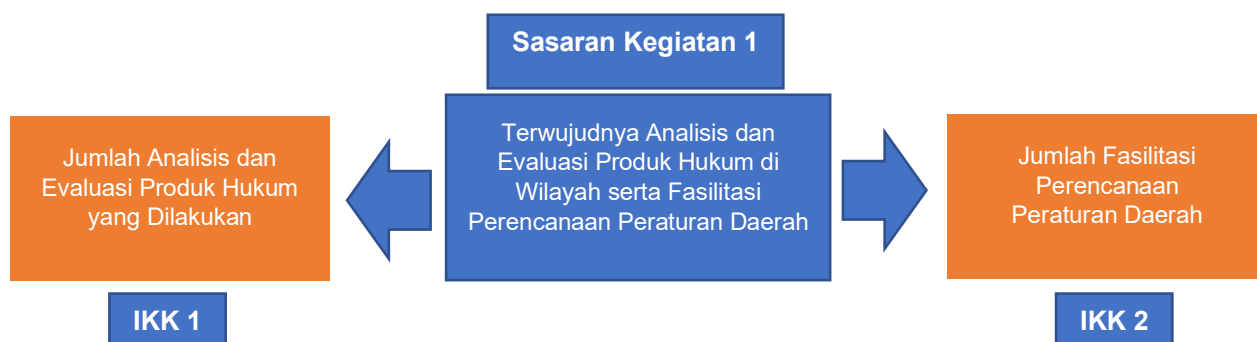
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	100%	400

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	96,18%	117,3
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	98,52%	123,16
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

**Gambar 16. Sasaran Kegiatan 1 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



### Indikator Kinerja Kegiatan 1: Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Indikator kinerja kegiatan jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan belum telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Adapun produk hukum yang dianalisis dan dievaluasi

adalah Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut.

- Rapat persiapan analisis dan evaluasi hukum
- FGD analisis dan evaluasi hukum
- Rapat perumusan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya Indikator kinerja kegiatan jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 82. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Indikator kinerja jumlah kegiatan jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan memiliki target yang sama, baik pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan telah tercapai 100%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, adanya koordinasi yang sinergis antara analis hukum kantor wilayah, bagian hukum Kota Palembang dan dinas lingkungan hidup selaku pemangku kepentingan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 83. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah, yakni melalui kegiatan inventarisasi, monitoring dan evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan inventarisasi dan monev terhadap Propemperda dan Propemperkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian dilakukan penelaahan dan pembahasan terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang belum diharmonisasikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu hari Rabu – Jumat tanggal 24 – 26 Juli 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 84. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah telah memenuhi target.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

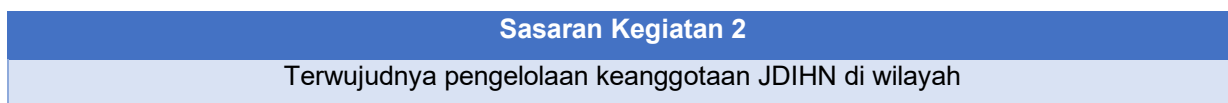
5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja ini dilatarbelakangi oleh koordinasi yg intens antara Pemerintah Daerah dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait memfasilitasi perencanaan peraturan daerah di setiap daerah di Sumatera Selatan.

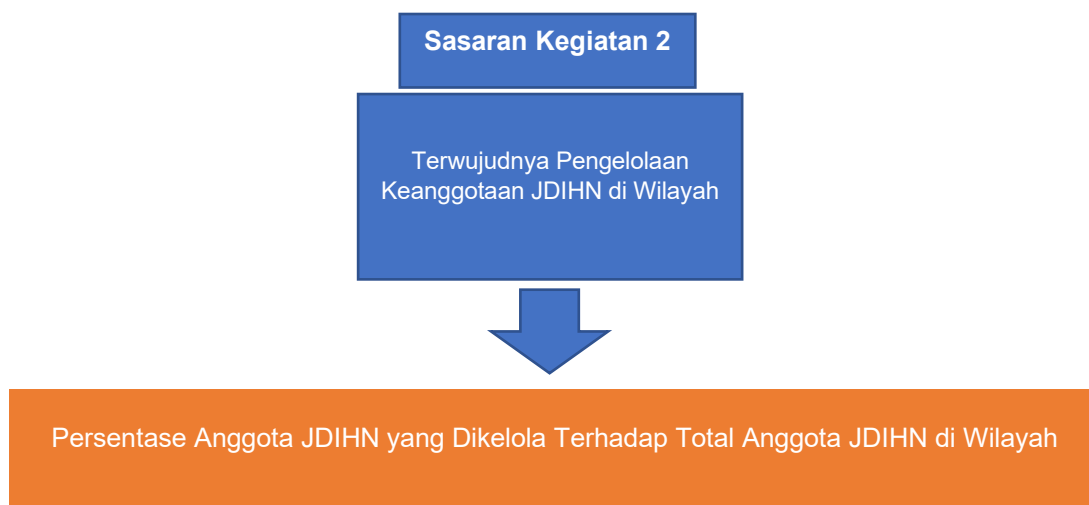
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk menunjang dan/atau mendukung capaian indikator kinerja ini perlu memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi,

Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



Gambar 17. Sasaran Kegiatan 2 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan



**Indikator Kinerja Kegiatan 2.1: Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

Tabel 85. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	100%	400

Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah dihitung dengan cara membagi jumlah anggota JDIHN yang dikelola dengan total anggota JDIHN di wilayah, kemudian dikali 100%.

$$x = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang dikelola}}{\text{Total anggota JDIH di wilayah}} \times 100\%$$

$$x = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Adapun 36 anggota JDIHN yang dikelola selama Tahun 2024 adalah: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Pemerintah Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan

Komering Ilir, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Pemerintah Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Prabumulih, beserta DPRD Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya Indikator kinerja kegiatan persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 86. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola Terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25%	25%	100%	400

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi kinerja indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah telah melebihi target yang telah ditentukan.

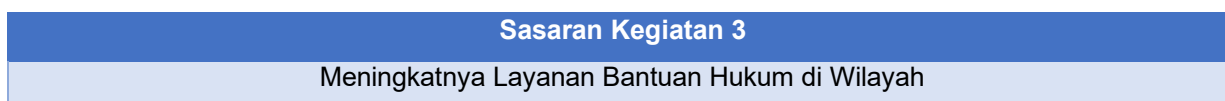
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

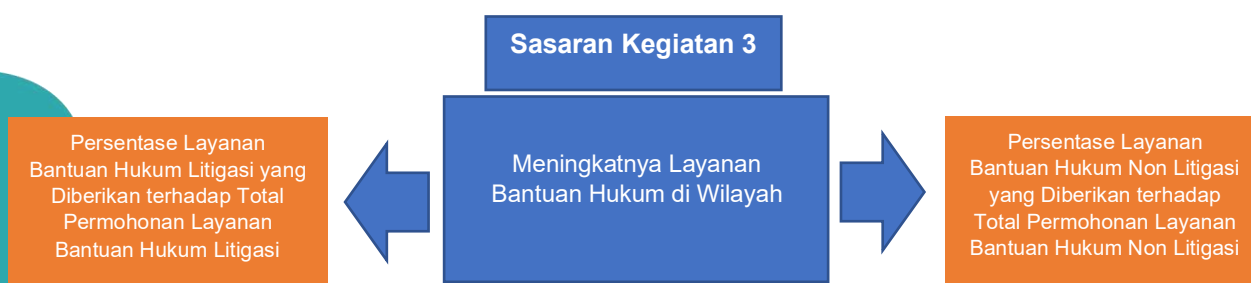
apaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah telah maksimal dikarenakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) instansi telah terintegrasi dan berpartisipasi aktif.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk meningkatkan dan/atau menunjang capaian kinerja pada indikator kinerja kegiatan ini, dilakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.



**Gambar 18. Sasaran Kegiatan 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan 3.1: Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	96,18%	117,30

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

- perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Pada Tahun 2024, terdapat total 341 permohonan layanan bantuan hukum litigasi, sedangkan jumlah orang atau kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi adalah sebanyak 328. Dengan demikian, Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi}} \times 100\%$$

$$x = \frac{328}{341} \times 100\% = 96,18\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	Target	-	77%	81%	82%	82%
		Realisasi	-	283,46%	100%	90,13%	96,18%
		Capaian	-	368,12%	123,45%	109,91%	117,30%

Sebagaimana pada tabel tersebut di atas, jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi cenderung mengalami sedikit penurunan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 89. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	82%	96,18%	117,30

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi telah mencapai target dikarenakan aktifnya Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi, dan lengkapnya dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum litigasi yang diunggah pada aplikasi Sidabankum sehingga permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan dapat diterima oleh verifikator.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi adalah telah dilaksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum dan telah dilakukannya verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum ke pemberi bantuan hukum.

**Indikator Kinerja Kegiatan 3.2: Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 90. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	98,52%	123,16

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyuluhan hukum;
- b) Konsultasi hukum;
- c) Investigasi kasus;
- d) Penelitian hukum;
- e) Mediasi;
- f) Negosiasi;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) Pendampingan di luar pengadilan; dan
- i) Drafting dokumen hukum.

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan}}{\text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$x = \frac{67}{68} \times 100\% = 98,52\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 91. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	Target	-	79%	80%	80%	80%
		Realisasi	-	361,11%	100%	93,13%	98,52%
		Capaian	-	457,10%	125%	116,41%	123,16%

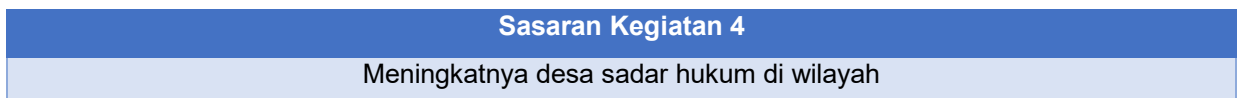
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 92. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

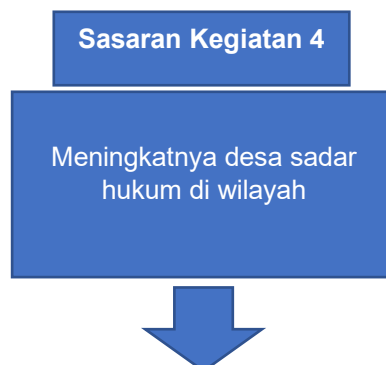
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	80%	98,52%	123,16

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, realisasi kinerja indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi belum mencapai target yang ditentukan. Selama Tahun 2024, telah tercapai sebesar 98,52% dari target 80%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi sudah mencapai target didukung oleh peran Organisasi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Capaian indikator kinerja Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi didukung dengan telah dilakukannya koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.



**Gambar 19. Sasaran Kegiatan 4 Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

**Indikator Kinerja Kegiatan:** Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 93. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	142,85%

target indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah terpenuhi dengan dikukuhkannya Desa Sadar Hukum Binaan, dengan rincian sebagai berikut.

$$x = \frac{\text{Jumlah DSH Lolos Verifikasi}}{\text{Jumlah usulan kelompok kadarkum}} \times 100\%$$

$$x = \frac{23}{23} \times 100\% = 100\%$$

Adapun 23 desa/kelurahan sadar hukum di Sumatera Selatan tersebut adalah sebagai berikut

Nomor	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Penantian	Jarai	Lahat
2	Jemaring	Jarai	Lahat
3	Karang Tanding	Jarai	Lahat
4	Serambi	Jarai	Lahat
5	Karang Caya	Sukamerindu	Lahat
6	Tanjung Agung	Sukamerindu	Lahat
7	Tanjung Nibung	Tanjung Debat	Lahat
8	Tanjung Kurung Ilir	Tanjung Debat	Lahat
9	Kencana Sari	Kikim Timur	Lahat
10	Marga Mulya	Kikim Timur	Lahat
11	Lubuk Layang Ulu	Kikim Timur	Lahat
12	Datar Serdang	Kikim Timur	Lahat

13	Lubuk Pedaro	Merapi Selatan	Lahat
14	Perangai	Merapi Selatan	Lahat
15	Nanjungan	Kikim Selatan	Lahat
16	Tanjung Alam	Kikim Selatan	Lahat
17	Sumber Karya	Gumay Ulu	Lahat
18	Tinggi Hari	Gumay Ulu	Lahat
19	Darmo	Gumay Talang	Lahat
20	Sugi Waras	Gumay Talang	Lahat
21	Sari Bungamas	Lahat	Lahat
22	Pagar Sari	Lahat	Lahat
23	Tanjung Lontar	Merapi Timur	Lahat

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya Indikator kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	100%	142,85%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Telah tercapainya indikator kinerja kegiatan selama periode tahun 2024 dilatarbelakangi dengan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait pembentukan desa sadar hukum..

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah didukung dengan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.

- Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM Kantor Wilayah

Capaian kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dan 4 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 95. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	68,18%	<b>136,36</b>
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%	22,22%	<b>88,88</b>
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	88,24%	<b>252,11</b>
		Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	<b>133,33</b>
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 indeks	3,96 indeks	<b>118,91</b>
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	<b>111,11</b>

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

**Gambar 20. Sasaran Kegiatan 1 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



**Indikator Kinerja Kegiatan 1.1: Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	68,18%	136,36

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung dengan formulasi/rumus yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dibagi dengan jumlah pengaduan yang diterima. Selama Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah menerima sebanyak 22 pengaduan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan sebanyak 15 aduan telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diperoleh capaian sebesar 68,18%.

$$X = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti}}{\text{Total dugaan pelanggaran}} \times 100\%$$

$$X = \frac{15}{22} \times 100\%$$

$$X = 68,18\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%	50%	68,18%	<b>136,36</b>

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebesar 68,18% dari target 50%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan disebabkan oleh instansi terkait selaku pihak terlapor bersedia membuka diri dan bekerjasama dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dilaporkan masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini ditunjang oleh koordinasi dan komunikasi yang baik yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan kepada instansi terkait pemangku kepentingan terhadap permasalahan HAM yang diberikan rekomendasi sehingga memudahkan untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada.

## Indikator Kinerja Kegiatan 1.2: Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Terhadap Total K/L/D di Wilayah

### 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 98. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah	25%	22,22%	88,88

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung Jumlah K/L/D wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibagi jumlah K/L/D di wilayah dikali 100%. Pada Tahun 2024 terdapat 2 Kabupaten/Kota dan 1 Kementerian yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia, yaitu:

- Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 23 Januari s.d 25 Januari 2024,
- Kabupaten Lahat pada tanggal 26 Februari s.d. 28 Februari 2024,
- UPT Pemasyarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2024;
- UPT Keimigrasian pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tanggal 10 November 2024.

Sehingga nilai pada indikator ini dapat dicapai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM}}{\text{Jumlah K/L/D di wilayah}} \times 100\%$$

$$X = \frac{4}{18} \times 100\%$$

$$X = 22,22\%$$

- ### 2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya
- Indikator kinerja kegiatan persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di wilayah tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

- ### 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase K/L/D yang Mendapatkan Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Terhadap Total K/L/D di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah	25%	25%	22,22%	88,88

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai tidak memenuhi target yaitu tercapai sebesar 22,22% dari 88,88%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di kewilayahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab kegagalan  
Capaian indikator kinerja ini belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya di Bidang HAM dan minimnya anggaran perjalanan dinas untuk menindaklanjuti rekomendasi yang lokasinya di luar kota.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Adapun hal yang menunjang keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini adalah tindaklanjut atas rekomendasi perlindungan HAM di wilayah oleh instansi terkait sejalan dengan meningkatnya pemahaman akan pentingnya pemenuhan dan penegakan HAM di tengah masyarakat.

**Indikator Kinerja Kegiatan 1.3:** Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 100. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	88,24%	252,11

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan predikat peduli HAM dibagi jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi dikali 100%. Pada tahun 2024 terdapat 15 Kabupaten/ kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota peduli ham. Di provinsi Sumatera Selatan terdapat 17 kabupaten/kota sehingga pada indikator ini dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kota peduli ham}}{\text{Jumlah kabupaten kota yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

$$X = \frac{15}{17} \times 100\%$$

$$X = 70,59\%$$

Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat peduli HAM antara lain :

1. Kota Palembang
2. Kota Pagaralam
3. Kota Lubuk Linggau
4. Kabupaten Prabumulih
5. Kabupaten Lahat
6. Kabupaten Musi Banyuasin
7. Kabupaten Banyuasin
8. Kabupaten Musi Rawas
9. Kabupaten Ogan Komering Ulu
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
12. Kabupaten Ogan Komering Ilir
13. Kabupaten PALI
14. Kabupaten Muara Enim
15. Kabupaten Empat Lawang

Dalam menentukan Kabupaten/ Kota Peduli HAM terdapat beberapa indikator penilaian, yaitu:

1. Hak Sipil dan Politik meliputi:
  - a. Hak atas bantuan hukum;
  - b. Hak atas informasi;
  - c. Hak turut serta dalam pemerintahan;
  - d. Hak atas keberagaman dan pluralisme, dan
  - e. Hak atas kependudukan.
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya meliputi:
  - a. Hak atas kesehatan;
  - b. Hak atas pendidikan;
  - c. Hak atas pekerjaan;
  - d. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta hak atas perumahan yang layak, dan
  - e. Hak perempuan dan anak.
2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 101. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%	35%	88,24%	<b>252,11</b>

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap total Kabupaten/Kota yang berpartisipasi di wilayah memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebesar 88,24% dari target 35%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan besarnya animo para Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadikan daerahnya berpredikat Peduli HAM.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilan adalah kerjasama/sinergi yang baik antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya untuk pemenuhan Hak Asasi Manusia di daerah serta tumbuhnya kesadaran dari penyelenggara pemerintah daerah perihal pentingnya menghadirkan pembangunan yang berspektif HAM.

#### Indikator Kinerja Kegiatan 1.4: Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 105. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	100%	133,33

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung dari jumlah Kabupaten/Kota yang tercapai di tahun berjalan dibagi jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dikali 100%. Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berpartisipasi dalam pelaksanaan RANHAM dan seluruhnya tercapai. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$X = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang tercapai}}{\text{Jumlah kabupaten kota yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

$$X = \frac{17}{17} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 136. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	75%	100%	<b>133,33</b>

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebesar 100% dari target 75%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Target Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM sedikit sedangkan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan luas dan terdiri dari 17 Kabupaten/Kota. Hal ini yang menyebabkan nilai capaian menjadi besar.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilan adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM tak lepas dari kemampuan petugas di Bidang HAM yang

memberikan pemahaman kepada para Kepala Daerah dan Kepala OPD serta melakukan pendampingan kepada para operator dalam pemenuhan data dukung kuesioner 120 variabel.

**Indikator Kinerja Kegiatan 1.5:** Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 104. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3.33 indeks	3,96 indeks	118,91

Nilai indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan didapat dari rata-rata hasil survei Badan Strategi dan Kebijakan Hukum dan HAM periode Bulan Januari sampai dengan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 105. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024**

No.	Bulan	Jumlah Responden	Nilai
1	Januari	30 responden	4
2	Februari	30 responden	3,99
3	Maret	49 responden	3,93
4	April	40 responden	3,99
5	Mei	30 responden	3,98
6	Juni	40 responden	3,93
7	Juli	30 responden	4,00
8	Agustus	35 responden	3,85
9	September	30 responden	3,98
10	Oktober	30 responden	3,89
11	November	30 responden	4,00
12	Desember	30 responden	3,96
<b>RATA-RATA</b>			<b>3,96</b>

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Tidak terdapat indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 109. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

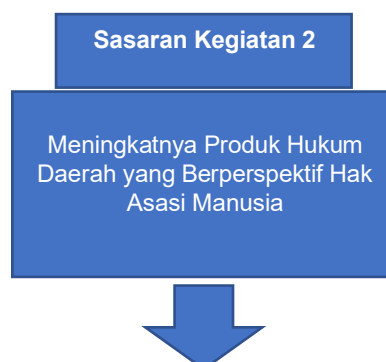
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 indeks	3,33 indeks	3,96 indeks	118,91

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan memiliki target yang sama. Adapun realisasi kinerja yang dicapai telah melampaui target yaitu tercapai sebesar 3,96 indeks dari target 3,33 indeks.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah karena adanya kesadaran akan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang ramah HAM dan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan  
Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilan diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah dikarenakan setiap UPT yang akan mendapat predikat WBK diharuskan untuk memenuhi standar pelayanan yang baik bagi masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

**Gambar 21. Sasaran Kegiatan 2 Direktorat Jenderal HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan

**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan**

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 107. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	100%	111,11

Indikator kinerja kegiatan ini dihitung dari jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah yang berperspektif HAM dibagi jumlah produk hukum daerah yang dianalisis dikali 100%. Pada Tahun 2024, telah disusun rekomendasi terhadap Peraturan Walikota Pagaralam tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil dari rapat perumusan rekomendasi rancangan produk hukum bernuansa HAM. Selanjutnya sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah diberikan pada bulan Desember 2024 ke Pemerintah Kota Pagar Alam.

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya  
Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 108. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang	90%	90%	100%	111,11

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
		Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan				

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Indikator Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan memiliki target yang sama. Adapun pada tahun 2024 indikator kinerja kegiatan tersebut telah tercapai 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.

5. Penyebab keberhasilan

Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Pagaralam yang terbuka dan menyambut baik atas kerjasama dari Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan untuk membahas Peraturan Walikota sebelum disahkan dan diberlakukan ke masyarakat;
- Sumber Daya Manusia yang mumpuni dari Pemerintah Kota Pagaralam untuk membahas bersama-sama dalam rapat pembahasan rekomendasi rancangan perundang-undangan sehingga kegiatan lancar tanpa halangan yang berarti.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun hal yang menunjang tercapainya indikator kinerja kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah yang menjadi mitra untuk membahas produk hukum daerah berperspektif Hak Asasi Manusia sangat komunikatif dan bekerjasama dengan baik.

- Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Capaian kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan terdiri dari 1 Sasaran Kegiatan dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 109. Capaian Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**

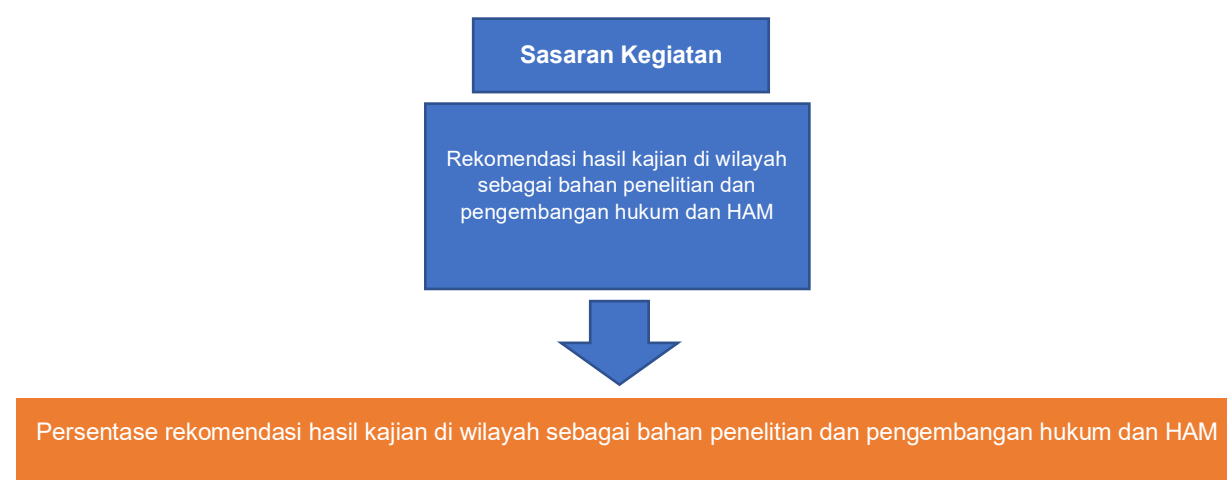
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi	80 %	100%	<b>125</b>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			

Adapun rincian capaian kinerja per indikator adalah sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah

**Gambar 22. Sasaran Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan**



### Indikator Kinerja Kegiatan 1: Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024

**Tabel 110. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	100%	125

Pada tahun 2024, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan adalah sebanyak 5 rekomendasi yang semuanya merupakan rekomendasi dengan pengambilan data dukung yang akurat (*evidence-based policy*) sehingga tergolong rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan.

Rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan yaitu diantaranya:

- a. Analisis implementasi strategi kebijakan hukum dan HAM;
- b. SIPKUMHAM;
- c. Monev survei IPK IKM dan survei integritas;
- d. Diskusi strategi kebijakan Kanwil Kemenkumham Sumsel;
- e. Indeks Reformasi Hukum

**Tabel 111. Perhitungan Persentase Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang di tindaklanjuti	80 %	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dikali 100% $\frac{5 \text{ rekomendasi}}{5 \text{ rekomendasi}} \times 100\%$ = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{100\%}{80\%} \times 100\%$ = 125%

2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

**Tabel 115. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi	Target	-	70%	80%	80%
	kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang di tindaklanjuti	Realisasi	-	90%	100%	100%
		Capaian	-	128,57%	125%	125%

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam Renstra

**Tabel 116. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	80%	80%	100%	125

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional  
Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM tidak memiliki perbandingan dengan standar nasional.
5. Penyebab keberhasilan  
Tercapainya indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Rapat Pengolahan dan Analisa data SIPKUMHAM serta analisis implementasi strategi kebijakan hukum dan HAM.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan Rapat Pengolahan dan Analisa Data Informasi SIPKUMHAM dapat terlaksana dengan baik karena adanya koordinasi yang baik antar pihak serta didukung oleh peran pimpinan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan ini.

## B. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari segi keuangan, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Adapun akuntabilitas keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 114. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>					
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	20.390.985.000	25.713.209.000	25.476.031.831	99,08
<b>TOTAL</b>		<b>20.390.985.000</b>	<b>25.713.209.000</b>	<b>25.476.031.831</b>	<b>99,08</b>
<b>Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Divisi Pemasyarakatan</b>					
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	165.543.563.000	135.604.971.000	134.848.452.711	99,44
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	139.952.958.000	153.372.678.000	150.575.913.677	98,18
<b>TOTAL</b>		<b>303.496.521.000</b>	<b>288.977.649.000</b>	<b>285.424.366.388</b>	<b>98,77</b>
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>					
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1.425.175.000	2.477.449.000	2.468.639.181	99,64
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	4.419.204.000	4.782.895.000	1.994.876.461	91,99
3	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	16.353.755.000	23.430.316.000	22.812.035.542	97,36
<b>TOTAL</b>		<b>22.198.134.000</b>	<b>30.690.660.000</b>	<b>29.680.478.079</b>	<b>96,33</b>
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>					
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	1.888.636.000	1.888.636.000	1.879.531.880	99,52
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	1.051.099.000	1.051.099.000	951.869.580	90,56
<b>TOTAL</b>		<b>2.939.735.000</b>	<b>2.939.735.000</b>	<b>2.831.401.460</b>	<b>94,31</b>
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>					
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	92.560.000	92.560.000	88.492.198	95,61
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.783.010.000	1.783.010.000	1.759.523.520	98,68
<b>TOTAL</b>		<b>1.875.570.000</b>	<b>1.875.570.000</b>	<b>1.848.015.718</b>	<b>98,53</b>

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>					
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	286.051.000	286.051.000	286.026.427	99,99
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	168.949.000	168.949.000	168.908.200	99,98
<b>TOTAL</b>		<b>455.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>454.934.627</b>	<b>99,99</b>
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>					
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	128.253.000	128.253.000	114.676.800	89,41
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDHN di wilayah	77.132.000	77.132.000	76.243.700	98,84
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1.372.920.000	1.372.920.000	1.343.603.200	97,86
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	99.750.000	99.750.000	88.451.000	88,67
<b>TOTAL</b>		<b>1.678.005.000</b>	<b>1.678.005.000</b>	<b>1.622.974.700</b>	<b>96,72</b>
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>					
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	57.028.000	57.028.000	56.606.700	99,26
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	172.706.000	172.706.000	169.890.148	98,37
<b>TOTAL</b>		<b>229.734.000</b>	<b>229.734.000</b>	<b>226.496.848</b>	<b>98,59</b>
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>					
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	285.196.000	285.196.000	283.112.109	99,27
<b>TOTAL</b>		<b>285.196.000</b>	<b>285.196.000</b>	<b>283.112.109</b>	<b>99,27</b>

Data per 31 Desember 2024 (sumber OMSPAN)

Beberapa sasaran kegiatan mengalami perubahan pagu anggaran yaitu

- Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan
- Meningkatkan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
- Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

Perubahan pagu anggaran pada beberapa sasaran kinerja disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan dan revisi anggaran pada tahun berjalan guna efisiensi pelaksanaan

anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran terjadi terutama pada UPT pemasyarakatan dengan melakukan revisi anggaran antar satuan kerja dan revisi anggaran oleh unit eselon I.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan maupun Unit Pelaksana Teknis berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut.

**Tabel 115. Realisasi Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
<b>TAHUN 2023</b>				
Belanja Pegawai	125.276.419.000	124.696.919.029	579.499.971	99,54%
Belanja Barang	195.556.924.000	193.862.498.305	1.694.425.695	99,13%
Belanja Modal	11.744.514.000	11.480.475.397	264.038.603	97,75%
<b>Total</b>	<b>332.577.857.000</b>	<b>330.039.892.731</b>	<b>2.537.964.269</b>	<b>99,24%</b>
<b>TAHUN 2024</b>				
Belanja Pegawai	134.803.051.000	133.295.457.289	1.507.593.711	98,88%
Belanja Barang	201.278.443.000	199.415.125.310	1.863.317.690	99,07%
Belanja Modal	16.756.186.000	16.697.787.866	58.398.134	99,65%
<b>Total</b>	<b>352.837.680.000</b>	<b>349.408.730.465</b>	<b>3.429.309.535</b>	<b>99,03%</b>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, target penyerapan anggaran tahun 2024 adalah 95% untuk jenis belanja pegawai, 90% untuk jenis belanja barang dan 90% untuk jenis belanja modal. Adapun jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi target penyerapan anggaran untuk semua jenis belanja

### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Adapun sub komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 variabel, yaitu:

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan penginputan sesuai dengan timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli;
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Adapun nilai SMART Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

## 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 10%;
- g) Penyerapan anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian output, bobot 25%.

Berikut merupakan rekapitulasi nilai IKPA Tahun 2024:

Tabel 116. Rekapitulasi Nilai IKPA Tahun 2024

RANK	SATKER	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	Nilai SMART (Bobot 50%)	Nilai IKPA (Bobot 50%)	Nilai Kinerja Anggaran
1	2	3 (75%)	4 (10%)	5 (15%)	6 (3+4+5)/2	7	8 (6+7)
1	Rupbasan Kelas II Baturaja	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00
2	Lapas Kelas I Palembang	100,00	100,00	100,00	50,00	49,95	99,95
3	Lapas Kelas IIB Kayu Agung	98,65	100,00	100,00	49,49	49,97	99,46
4	Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang	100,00	100,00	100,00	50,00	49,39	99,39
5	Lapas Kelas III Sarolangun Rawas	100,00	100,00	100,00	50,00	46,63	96,63
6	Lapas Kelas IIA Banyuasin	91,28	100,00	100,00	46,73	49,48	96,21
7	Bapas Kelas I Palembang	100,00	100,00	66,55	47,49	48,59	96,08
8	Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti	100,00	66,67	66,65	45,83	49,96	95,79
9	BPHN	100,00	100,00	82,15	48,66	46,08	94,74
10	Bapas Kelas II OKU Induk	100,00	83,33	33,35	44,17	50,00	94,17
11	Lapas Kelas IIB Empat Lawang	98,44	66,67	66,65	45,25	48,75	94,00
12	Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau	91,01	66,67	66,65	42,46	49,98	92,44
13	Ditjen Imigrasi	98,89	80,00	0,00	41,08	49,99	91,07
14	Lapas Kelas III Pagar Alam	98,84	66,67	66,65	45,40	45,58	90,98
15	Bapas Kelas II Lahat	95,45	66,67	0,00	39,13	49,73	88,86
16	Sekretariat Jenderal	100,00	33,33	12,90	40,13	47,88	88,01

17	Lapas Kelas IIA Tanjung Raja	96,91	66,67	66,65	44,67	43,15	87,82
18	Ditjen Kekayaan Intelektual	100,00	0,00	0,00	37,50	50,00	87,50
19	Badan Strategi Kebijakan	100,00	0,00	0,00	37,50	48,02	85,52
20	Lapas Kelas IIB Martapura	96,85	100,00	100,00	48,82	36,37	85,19
21	Lapas Kelas IIB Sekayu	100,00	66,67	66,65	45,83	37,24	83,07
22	Ditjen Peraturan Perundang - undangan	91,37	0,00	0,00	34,26	48,73	82,99
23	Lapas Kelas IIB Muara Dua	98,08	66,67	66,65	45,11	36,97	82,08
24	Bapas Kelas II Muratara	100,00	83,33	43,00	44,89	34,37	79,26
25	Rutan Kelas II Baturaja	83,33	100,00	66,70	41,25	37,50	78,75
26	Ditjen Pemasyarakatan	95,30	0,00	0,00	35,74	37,30	73,04
27	Rutan Kelas II Prabumulih	49,31	33,33	33,35	22,66	49,28	71,94
28	Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim	44,84	60,00	0,00	19,82	47,73	67,55
29	Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin	68,88	33,33	33,35	30,00	37,50	67,50
30	LPKA Kelas I Palembang	69,23	33,33	33,35	30,13	36,94	67,07
31	Ditjen Hak Asasi Manusia	38,89	0,00	0,00	14,58	49,69	64,27
32	Lapas Kelas IIA Lahat	35,77	0,00	0,00	13,41	49,63	63,04
33	Ditjen Administrasi Hukum Umum	33,33	0,00	0,00	12,50	49,00	61,50
34	Kanim Kelas I TPI Palembang	47,39	66,67	0,00	21,10	35,17	56,27
35	Lapas Kelas IIB Muara Enim	28,10	0,00	0,00	10,54	37,04	47,58
36	Rupbasan Kelas I Palembang	40,00	0,00	0,00	15,00	31,27	46,27
37	Rutan Kelas I Palembang	0,59	0,00	0,00	0,22	36,88	37,10
RATA-RATA							80,89

Capaian Kinerja Anggaran diperoleh dari dua variable yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Adapun capaian kinerja anggaran belum dapat dihitung dikarenakan nilai SMART DJA belum tersedia pada aplikasi tersebut.

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

##### **1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun capaian kinerja yang diinput pada aplikasi e-performance tersebut adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi serta Kepala Satuan Kerja pada tahun 2024, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Subbab Capaian Kinerja Organisasi tersebut di atas.

##### **2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan Rencana Aksi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah melaksanakan rencana aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan telah diunggah setiap bulannya pada link sebagai berikut:

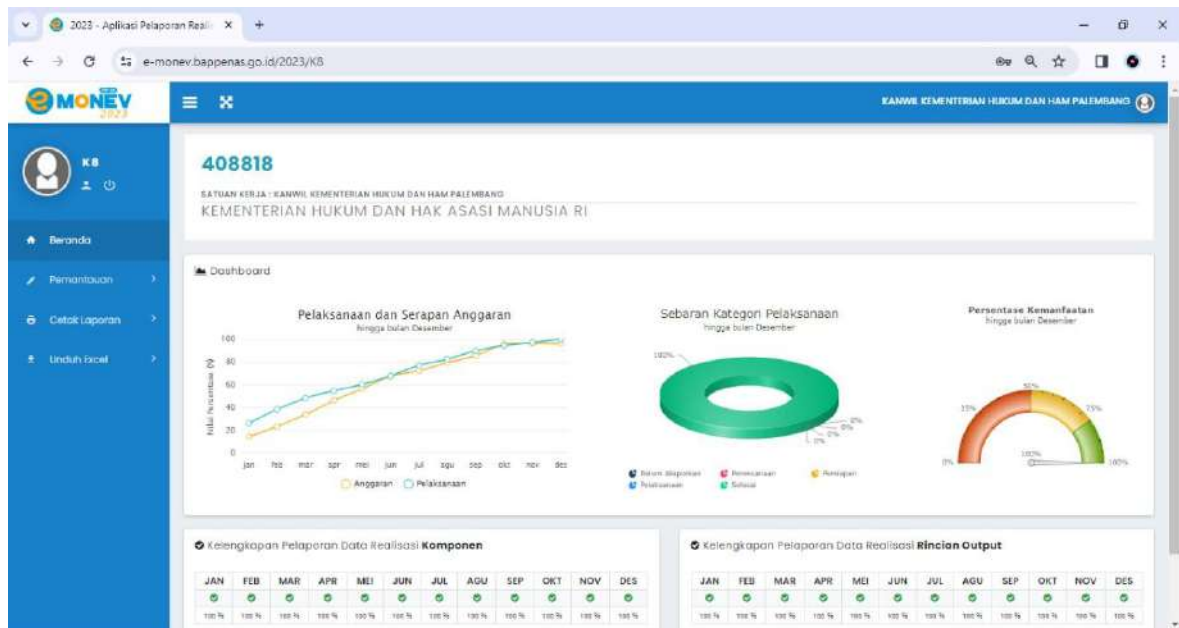
- a. <https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/Q0za4E4r3sUBdCU>  
(Bidang Administrasi);
- b. <https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/JOMPGyj3swdv9i0>  
(Bidang Imigrasi);
- c. <https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/Fkx0WpSmowVUdfC>  
(Bidang Pemasyarakatan);
- d. <https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/thQaHGcv/tv769G>  
(Bidang Pelayanan Hukum dan HAM).

##### **3. E-Monev Bappenas**

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga

digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**Gambar 23. E-Monev Bappenas**



#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

- **Prioritas Nasional 4: Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa**

Kementerian Hukum dan HAM turut mewujudkan prioritas nasional 4 melalui data dan informasi Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), Potensi Indikasi Geografis, dan Indikasi Asal.

- **Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Jumlah Ekspresi Budaya Tradisional ada 36, yaitu:

1. Adat Timbang Kepala Kebo;
2. Ande-Ande
3. Tari Erai-Erai;
4. Tari Siwar;
5. Tari Sambut Muara Enim;
6. Tengkiang;
7. Tari Setabik;
8. Tari Dan Lagu Silampari;
9. Tari Piring Gelas;

10. Tari Putri Behias;
11. Tari Turak;
12. Adat Perkawinan Mabang Handak;
13. Gilas Sangkirai;
14. Incang-Incang Pedamaran;
15. Jejuluk;
16. Midang;
17. Setakatan;
18. Tanidor Pedamaran;
19. Tari Cang-Cang;
20. Tari Penguton;
21. Pendandanan Ranau;
22. Adok;
23. Hiring-Hiring;
24. Kulintang Komeriing;
25. Pisaan;
26. Tari Sada Sabia;
27. Tari Putri Bekhusek;
28. Tari Kebagh;
29. Aesan Paksangko;
30. Ngobeng;
31. Rumah Rakit;
32. Tepung Tawar Perdamaian;
33. Tari Lading;
34. Dulmuluk;
35. Surat Ulu; Dan
36. Tembang Batanghari Sembilan.

➤ Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Jumlah pengetahuan tradisional ada 27, yaitu:

1. Sedekah Serabi;
2. Sedekah Rame;
3. Ketu Linggau;
4. Sedekah Ramo;
5. Bekasam Ogan Ilir;
6. Gebeng Khas Ogan Ilir;
7. Pindang Meranjat;
8. Pindang Pegagan;
9. Biduk Kajang;
10. Gerabah Khas Kayu Agung;

11. Gulo Puan;
12. Kepudang;
13. Kue Cupu;
14. Lelang Lebak Lebung;
15. Tikar Purun Pedamaran;
16. Kain Bidak Komerling;
17. Burgo;
18. Kue Lapan Jam;
19. Lak Palembang;
20. Selendang Muzawaroh;
21. Tanjak Palembang;
22. Tempoyak Palembang;
23. Tepung Tawar Perdamaian;
24. Segarurung;
25. Tahok Tutok;
26. Pempek Palembang.

➤ **Indikasi Asal**

Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Terdapat 1 (satu) indikasi asal, yaitu kue gunjing khas Semende.

- **Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**

Dalam rangka mendukung terwujudnya prioritas nasional 7, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melaksanakan berbagai upaya seperti dalam hal pemberian bantuan hukum baik litigasi dan nonlitigasi, Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari progress beberapa realisasi capaian kinerja. Bahkan, terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target itu sendiri. Meski demikian, masih terdapat sasaran kinerja yang tidak dapat dilakukan perhitungan, yakni Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aduan terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk pada Tahun 2024. Di samping itu juga, masih terdapat sasaran kinerja yang capaiannya belum maksimal, di antaranya yakni:

- Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan Sasaran kegiatan ini tidak tercapai dengan maksimal dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi oleh UPT Pemasarakatan dalam mengisi survei kepuasan terhadap layanan kesekretariatan yang menyebabkan nilai indeks tidak optimal.
- Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan Tidak maksimalnya capaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani. Indikator kinerja kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan sepanjang Tahun 2024 tidak ada kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah Rendahnya capaian indikator kinerja kegiatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah pada tahun 2024 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mengakibatkan PNBP fidusia menurun.

Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 117. Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	101
<b>Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Divisi Pemasarakatan</b>		
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	111,40
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	84
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>		
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>		
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-569,50
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111,11
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	-
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	120,100
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>		

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDHN di wilayah	400
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	120,22
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>		
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	145,98
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	111,11
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	125

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperoleh nilai yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

## B. Saran

- 1) Diperlukan upaya-upaya peningkatan PNPB khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum melalui sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai pelayanan jasa Administrasi Hukum Umum;
- 2) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ilham Djaya

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta jajarannya telah melaksanakan perjanjian kinerja dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi capaian kinerja. Bahkan, terdapat beberapa indikator yang telah melebihi target itu sendiri. Meski demikian, masih terdapat sasaran kinerja yang tidak dapat dilakukan perhitungan, yakni Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aduan terkait pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk pada Tahun 2024. Di samping itu juga, masih terdapat sasaran kinerja yang capaiannya belum maksimal, di antaranya yakni:

- Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan  
Sasaran kegiatan ini tidak tercapai dengan maksimal dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi oleh UPT Pemasarakatan dalam mengisi survei kepuasan terhadap layanan kesekretariatan yang menyebabkan nilai indeks tidak optimal.
- Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan  
Tidak maksimalnya capaian sasaran kegiatan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani. Indikator kinerja kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan sepanjang Tahun 2024 tidak ada kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah  
Rendahnya capaian indikator kinerja kegiatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rendah pada tahun 2024 yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mengakibatkan PNBP fidusia menurun.

Adapun rincian capaian masing-masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 117. Capaian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
<b>Sekretariat Jenderal - Divisi Administrasi</b>		
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	101
<b>Direktorat Jenderal Pemasarakatan - Divisi Pemasarakatan</b>		
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	111,40
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	84
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi - Divisi Keimigrasian</b>		
1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	56
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	111,11
3	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>		
1	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	-569,50
2	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	111,11
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>		
1	Terwujudnya Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	-

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	120,10
<b>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan</b>		
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	125
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	100
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>		
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100
2	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	400
3	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	120,22
4	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	142,86
<b>Direktorat Jenderal HAM</b>		
1	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	145,98
2	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	111,11
<b>Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM</b>		
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusiadi wilayah	125

Di samping itu, capaian kinerja lainnya seperti e-performance, e-monev, dan target kinerja yang telah secara rutin dan tepat waktu diinput serta memperoleh nilai yang baik. Meski demikian, masih diperlukan upaya-upaya khususnya untuk meningkatkan capaian perjanjian kinerja serta capaian kinerja anggaran (SMART dan IKPA) sehingga diperoleh nilai yang maksimal. Untuk itu, diperlukan komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

## B. Saran

- 1) Diperlukan upaya-upaya peningkatan PNBPN khususnya dalam bidang Administrasi Hukum Umum melalui sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengenai pelayanan jasa Administrasi Hukum Umum;
- 2) Diperlukan percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja masing-masing divisi/program guna mengoptimalkan capaian kinerja organisasi;
- 3) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan unit-unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, instansi pemerintah terkait dan *stakeholder* lainnya guna peningkatan kinerja organisasi dan mencapai target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, diharapkan dapat memberikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ilham Djaya



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 20.390.985.000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 20.390.985.000,-

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal



Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K., M.H.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Sumatera Selatan



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP 196412201991031002

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

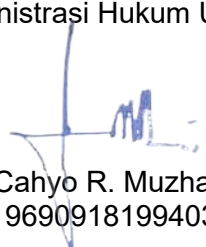
Cahyo R. Muzhar  
NIP 196909181994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 2.939.735.000,-</b>
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.939.735.000,-

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

  
Cahyo R. Muzhar  
NIP 196909181994031001

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

  
Ilham Djaya  
NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasaryakatan

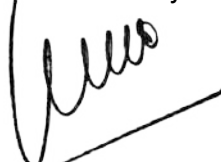
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasaryakatan

  
Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM RI Sumatera Selatan

  
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

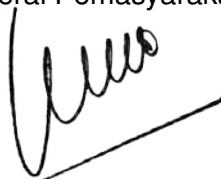
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 164.883.110.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 164.883.110.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 139.952.958.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp 139.952.958.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

  
Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Selatan

  
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sumatera Selatan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM RI Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim  
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 5.844.379.000,-</b>
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 5.844.379.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 16.353.755.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 16.353.755.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Min Usihen  
NIP 196903091994032001

Ilham Djaya  
NIP 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

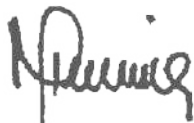
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.875.570.000,-</b>
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.875.570.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
 Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Min Usihen  
 NIP 196903091994032001



Ilham Djaya  
 NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana  
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

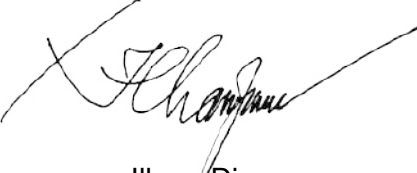
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 455.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 455.000.000,-

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana  
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Jakarta, 1 Februari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

  
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya

NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

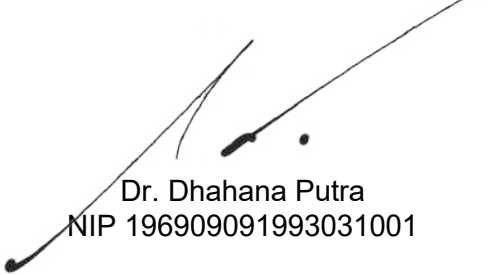
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

  
Dr. Dhahana Putra  
NIP 196909091993031001

  
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SUMATERA SELATAN DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

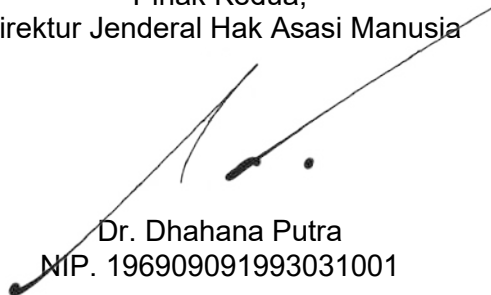
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Wilayah	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Wilayah	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pemajuan dan Penegakan HAM</b>	<b>Rp. 229.734.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 229.734.000,-

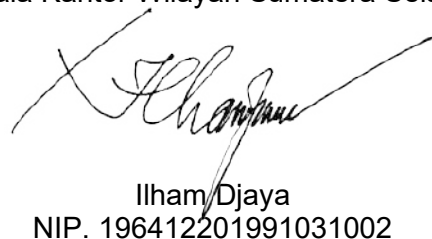
Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan



Dr. Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 1 Februari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

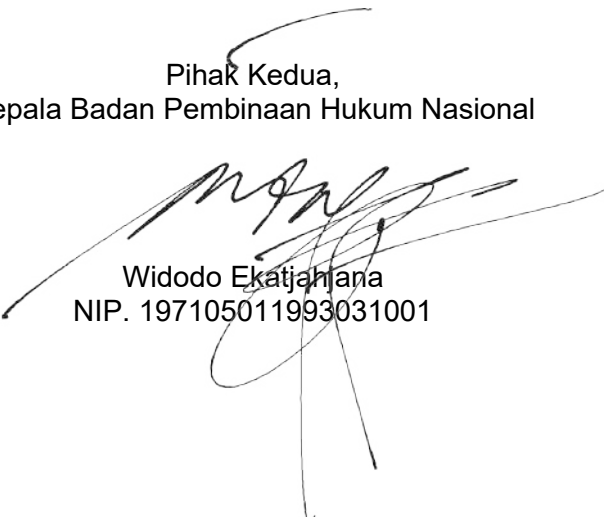
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**  
**DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

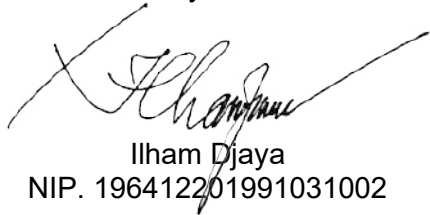
Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pembentukan Regulasi</b>	<b>Rp 128.253.000,-</b>
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 128.253.000,-
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp 1.549.802.000,-</b>
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.549.802.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

  
Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

  
Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan  
Hukum dan HAM

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Sumatera Selatan

Y. Ambeg Paramarta  
NIP. 196503221987031002

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN**  
**HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

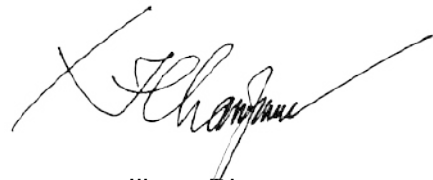
Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 285.196.000,-</b>
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 285.196.000,-

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan  
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta  
NIP. 196503221987031002

Jakarta, 1 Februari 2024  
Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Sumatera Selatan



Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Djaya

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024  
Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Sumatera Selatan

Ilham Djaya  
NIP. 196412201991031002



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN**  
**DIVISI ADMINISTRASI**  
**BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN**

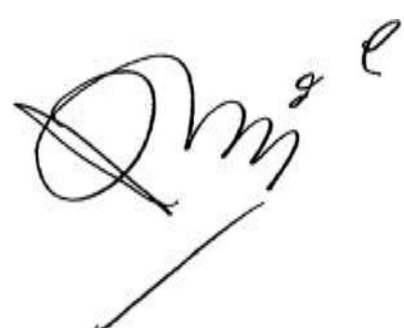
<b>NOMOR SOP</b>	
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	22 Maret 2022
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>  Dirancang untuk bersama kita <b>HARUN SULIANTO</b> 19650408 198703 1 002
<b>NAMA SOP</b>	<b>PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah</li><li>8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia</li><li>9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li><li>2. Memahami pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</li></ol>
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Permintaan Data LKIP</li><li>2. SOP Permintaan Data Laporan Target Kinerja</li><li>3. SOP Penyusunan Laporan Target Kinerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/Printer/Scanner</li><li>2. Jaringan Internet</li><li>3. Disposisi</li><li>4. Jaringan Telekomunikasi</li></ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>
Permintaan data laporan capaian kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan capaian kinerja secara menyeluruh	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**

No	Kegiatan	PELAKSANA					Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Kepala Bagian PPL untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Humas dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	15 Menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)						Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 Minggu	Konsep Laporan	Konsep Laporan dilengkapi dengan Nota dinas berjenjang dan surat pengantar laporan
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Konsep Laporan	30 menit	Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Humas dan Laporan	
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Konsep Laporan yang sudah di Setujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah di Setujui oleh Kabag Program dan Humas	30 menit	Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah di Setujui oleh Kepala Divisi Administrasi	30 menit	LAKIP yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
DIVISI PEMASYARAKATAN**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>PAS.140.OT.02.02.2016</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>06 JANUARI 2011</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	<b>27 APRIL 2016</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>27 APRIL 2016</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Direktur Jenderal Pemasyarakatan</b>  <b>I WAYAN K.DUSAK</b> <b>NIP. 19570727 198303 1001</b>
<b>NAMA SOP :</b>	<b>PENGUMPULAN DATA KINERJA</b>
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1614);	Memahami penilaian kinerja, menguasai komputer

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2009)
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

**KETERKAITAN:**

1. SOP ANALISA DAN PENYAJIAN DATA KINERJA
2. SOP EVALUASI DAN LAPORAN

**PERINGATAN :**






**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

KOMPUTER  
ATK

**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**

## SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

### A. UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

KEGIATAN	UPT			Waktu	Output
	Ka UPT	Ka Bid/ Ka Sie	Ka Sie/ Ka Sub Sie		
1 Mendisposisi kepada Ka Bid/ Ka Sie terkait untuk melakukan input data kinerja organisasi				3 Hari	Surat disposisi
2 Memerintahkan kepada Ka Sie/ Ka Sub Sie terkait untuk melakukan input data kinerja organisasi					surat perintah
3 Mengisi data input kinerja organisasi melalui aplikasi Manajemen Kinerja Organisasi				3 Hari	Data input kinerja organisasi yang telah diisi
4 Verifikasi data isian input kinerja organisasi				3 Hari	Data isian input kinerja organisasi yang telah diverifikasi
5 Verifikasi, validasi dan penandatanganan data isian input kinerja organisasi				3 Hari	Data isian input kinerja organisasi yang telah diverifikasi, validasi, dan ditandatangani

B. DIVISI PEMASYARAKATAN

KEGIATAN	DIVISI PAS			Waktu	Output
	Ka Divisi PAS	Ka Bid	Ka Subbid		
1 Disposisi untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT di wilayahnya				2 jam	surat disposisi ke KaBid untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT
2 Disposisi untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT di wilayahnya				2 jam	surat disposisi ke KaSubBid untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT
3 verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT di wilayahnya				1 Hari	Data isian input kinerja organisasi oleh UPT yang telah diverifikasi dan validasi

### C. DITJEN PEMASYARAKATAN

KEGIATAN	DIREKTORAT				SEKRETARIAT			Waktu	Output
	Ka. Sie	Ka. Subdit	Ka. Sie Evalap	Direktur	Sesditjenpas	Kabag PP	Kasubbag Evalap		
1 Melakukan rekapitulasi data yang didapatkan dari UPT		Valid						2 jam	surat disposisi ke KaBid untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT
2 Mencek dan validasi data rekapitulasi Data Pencapaian Kinerja	Tidak Valid		Valid					2 jam	surat disposisi ke KaSubBid untuk verifikasi dan validasi data isian input kinerja organisasi oleh UPT
3 Mencek dan validasi data rekapitulasi Data Pencapaian Kinerja		Tidak Valid		Valid				1 Hari	Data isian input kinerja organisasi oleh UPT yang telah diverifikasi dan validasi
4 Menyusun rekapitulasi pencapaian kinerja standar direktorat			Tidak Valid					1 Hari	Rekapitulasi data
5 Mendisposisi rekapitulasi data pencapaian kinerja ke Kabag PP								1 Hari	Rekapitulasi data
6 Mendisposisi data rekapitulasi data pencapaian kinerja ke Kasubbag Evalap								1 Hari	Rekapitulasi data
7 Merekapitulasi data kinerja seluruh standar								1 Hari	Rekapitulasi data

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN

NOTA DINAS  
Nomor: W6. PR.03-0349

Kepada : 1. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;  
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;  
3. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;  
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Dari : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Hal : Permintaan LKjIP Tahun 2024

Tanggal : 2 Desember 2024

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024** (Januari sampai dengan akhir Desember 2024);
3. Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKjIP, dan foto dokumentasi kegiatan;
4. Laporan Kinerja Kepala Divisi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui aplikasi SISUMAKER dan diunggah pada tautan [https://drive.google.com/drive/folders/1S9ykNFwFgAY6nPJgB567ieoQ5MSAT8KX?usp=s\\_haring](https://drive.google.com/drive/folders/1S9ykNFwFgAY6nPJgB567ieoQ5MSAT8KX?usp=s_haring) paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ilham Djaya

Tembusan:

1. Para Pejabat Administrator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Para Pejabat Pengawas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
3. Para Operator Penyusun LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN  
Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang

Laman : <http://sumsel.kemenkumham.go.id> Pos-el: [kanwilsumsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.6.PR.03-0350  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan LKjIP Tahun 2024

2 Desember 2024

Yth. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis  
di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan  
di Tempat

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat berdasarkan **Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024** (Januari sampai dengan akhir Desember 2024).
3. Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung seperti realisasi anggaran, pencapaian yang telah diperoleh, penghargaan yang telah diterima, SK Tim Penyusun LKjIP, dan foto dokumentasi kegiatan.
4. Laporan Kinerja Satuan Kerja (UPT) disampaikan kepada Kepala Divisi masing-masing dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Aplikasi SISUMAKER dan diunggah pada tautan <https://drive.google.com/drive/folders/1S9ykNFwFgAY6nPJgB567ieoQ5MSAT8KX?usp=sharing> paling lambat tanggal **30 Desember 2024**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Ilham Djaya

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.